

**PERANAN ORANG TUA TUNGGAL (JANDA CERAI MATI)
TERHADAP PEMENUHAN HAK ANAK**

(Studi Kasus di Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar)

SKRIPSI

Oleh :

Muhammad Tsabut Su'aifin

13210188



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2018

**PERANAN ORANG TUA TUNGGAL (JANDA CERAI MATI)
TERHADAP PEMENUHAN HAK ANAK**

(Studi Kasus di Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar)

SKRIPSI

Oleh:

**Muhammad Tsabut Su'aifin
NIM 13210188**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2018**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PERANAN ORANG TUA TUNGGAL (JANDA CERAI MATI) TERHADAP PEMENUHAN HAK ANAK

(Studi Kasus di Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun oleh orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis dibatalkan demi hukum.

Malang, 01 Mei 2018

Penulis,



Muhammad Tsabut Su'aifin
NIM 13210188

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muhammad Tsabut Su'aifin
NIM 13210188 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah (Hukum Keluarga Islam)
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
dengan judul:

PERANAN ORANG TUA TUNGGAL (JANDA CERAI MATI)

TERHADAP PEMENUHAN HAK ANAK

(Studi Kasus di Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua jurusan
Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah
(Hukum Keluarga Islam)



Dr. Sudirman, M.A
NIP 197705062003122001

Malang, 01 Mei 2018
Dosen Pembimbing,

ONLINE

Faridatus Suhadak, M.HI
NIP197904072009012006

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i MUHAMMAD TSABUT SU'AIFIN, NIM 13210188, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

PERANAN ORANG TUA TUNGGAL (JANDA CERAI MATI) TERHADAP PEMENUHAN HAK ANAK (Studi Kasus di Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: B+

Malang, 03 Agustus 2021

Scan Untuk Verifikasi



Prof. Dr. Saifullah, S.H., M.Hum
IP 12052000031001

MOTTO

"خير الناس أنفعهم للناس"

"Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lain"
(HR. AthThabrani, Al-Mu'jam Al- Awsath No. 5787)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur hanyalah kepada Allah SWT, Dzat yang telah melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita semua, khususnya kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul :

PERANAN ORANG TUA TUNGGAL (JANDA CERAI MATI) TERHADAP PEMENUHAN HAK ANAK

(Studi Kasus di Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar)

Shalawat serta salam tetap tercurah atas junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, yang selalu kita jadikan tauladan dalam segala aspek kehidupan kita, juga segenap keluarga, para sahabat serta umat beliau hingga akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan progam Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan sebagai wujud serta partisipasi penulis dalam mengembangkan ilmu-ilmu yang telah penulis peroleh dibangku kuliah khususnya di Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah.

Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh karena itu perkenankan penulis berterimakasih kepada:

1. Kedua Orang Tua tercinta, Bapak Ismanto dan Ibu Siti Naimah yang tak pernah padam semangatnya untuk terus memberikan dukungan serta tak pernah lelah mendoakan, setiap tetesan peluhmu adalah kewajibanku untuk terus berjuang dan tak lupa juga adik saya tercinta Maulida Agustina yang selalu memberikan semangat dan dukungan hingga saat ini.
2. Ibu Faridatus Suhadak, M.HI, selaku ibu selama di Malang, satu kata pun tidak mampu mengartikannya dan sekaligus dosen pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi.
3. Bapak Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Dr. H. Saifullah, S.H, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Bapak Dr. Sudirman, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas dan penuh kesabaran. Semoga ilmu yang kami dapatkan bermanfaat dan berguna bagi penulis untuk bekal selanjutnya.
7. Seluruh Staf serta Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberi banyak bantuan dalam pelayanan akademik selama menimba ilmu di Universitas ini.
8. Yayah, *Kenthir, Menyok, Zia, Farhan, Pak Longor, Andi, Iqbal, Nur Fitriani,*

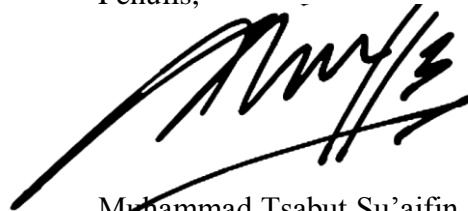
Rais, kalian patner kerja dan sejuta arti teruntuk kalian sahabatku.

9. Sahabat-sahabat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Radikal Al-Faruq yang selalu mendukung penulis selama menempuh pendidikan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
10. Teman-teman Jurusan Al Ahwal Al Syakhsiyyah 2013 yang bersama-sama dengan penulis menyelesaikan kewajiban selama masa studi di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
11. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi saya khususnya dan pembaca. Disini penulis sebagai manusia biasa tidak akan luput dengan yang Namanya dosa, menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 01Mei 2018

Penulis,



Muhammad Tsabut Su'aifin
NIM13210188

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= tsa	ع	= ‘ (koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambing "ع" .

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a” , *kasrah* dengan “I” , *dlommah* dengan “u”, sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khususnya untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta'marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ 'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء - syai'un أمرت - umirtu

النون - an-nau'un تأخذون - ta'khudzûna

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang

dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : **وإن الله لهو خير الرازقين** - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh : **وما محمد إلا رسول** = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

إن أول بيت وضع للنس = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh : **نصر من الله وفتح قريب** = nas'rûn minallâhi wa fathun qarîb

لله الامر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
BUKTI KONSULTASI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	ix
PEDOMAN TRANSLATERAS	xiv
DAFTAR ISI.....	xviii
ABSTRAK.....	xix
ABSTRACT	xx
ملخص.....	xxi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Oprasional.....	7
F. Sistematika Pembahasan	8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu.....	10
B. Kajian Pustaka.....	15
1. Pengertian Keluarga	15
2. Macam Keluarga	17
a. Jenis perkawinan.....	17
b. Garis Keturunan	18
c. Anggota Keluarga	18
d. Permukiman.....	19
e. Kekuasaan.....	20
3. Pengertian Orang Tua.....	20
4. Kedudukan Orang Tua	21
5. Kewajiban Orang Tua.....	22
1) Kewajiban Orang Tua dalam Islam.....	22
2) Kewajiban Orang Tua dalam Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014	26
6. Pengertian Anak	29
1) Pengertian Anak dalam Islam	29
2) Pengertian Anak Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014	32
7. Hak Anak	33
1) Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Islam.....	33
2) Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Undang-Undang	

Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014	40
-------------------------------------------	----

BAB III METODELOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	46
B. Pendekatan Penelitian	46
C. Lokasi Penelitian.....	47
D. Jenis dan Sumber Data	48
E. Metode Pengumpulan Data	50
F. Metode Pengolahan Data.....	52

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	55
1. Profil Daerah.....	55
2. Penduduk	56
B. Paparan Data.....	57
1. Peranan Orang Tua Tunggal (JandaCeraaiMati) dalam Memenuhi Hak Anak di Kelurahan Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kota Blitar	57
2. Pemenuhan Hak Anak dalam Perspektif UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak	65
C. Analisis Data	68

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	75
B. Saran	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

ABSTRAK

Muhammad Tsabut Su'aifin, 13210188, 2018. **PERANAN ORANG TUA TUNGGAL (JANDA CERAI MATI) TERHADAP PEMENUHAN HAK ANAK** (*Studi Kasus di Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar*). Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah (Hukum Keluarga Islam), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Faridatus Suhadak, M.HI.

Kata Kunci: Peranan, Orang tua tunggal, Hak Anak.

Menjadi orang tua tunggal dalam sebuah rumah tangga tentu saja tidak mudah. Terlebih bagi seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya. Dalam perwujudannya terkadang anak yang menjadi korban tidak mendapatkan haknya sesuai yang tercantum dalam UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Padahal telah diatur secara eksplisit mengenai hak-hak anak dalam undang-undang tersebut. Baik itu berupa hak pendidikannya, hak nafkahnya, hak kasih sayangnya ataupun unsur-unsur hak anak lain. Tetapi pada kenyataannya masih saja belum maksimal.

Rumusan masalah yang di angkat pada penelitian ini yaitu: 1. Bagaimana upaya orang tua tunggal (janda cerai mati) dalam memenuhi hak anak di Kelurahan Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kota Blitar?, 2. Bagaimana upaya pemenuhan hak anak dalam perspektif UU No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak?.

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian empiris. Pendekatan yang digunakan penulis pada penelitian ini dengan pendekatan *case study* yang diolah secara kualitatif. Sedangkan memperoleh data dan mengumpulkannya dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Kemudian data selanjutnya di analisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif.

Pada hasil penelitian ini, Peranan orang tua tunggal (janda cerai mati) terhadap pemenuhan hak anak di Kelurahan Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kota Blitar pasca perceraian selama ini belum mampu untuk melaksanakan ketentuan perlindungan hak-hak anak, disebabkan beberapa faktor yang menjadi kendala, antara lain keterbatasan ekonomi, kelalaian orang tua. Pemahaman masyarakat dalam melaksanakan kewajiban sebagai orang tua terutama pelaku perceraian sangat minim terbukti dengan pengetahuan hak anak yang hanya sebatas tentang biaya hidup saja. Sehingga hak-hak anak yang lain tidak terpenuhi. Sedangkan pemenuhan hak anak perspektif Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan dalam tatanan implementasinya belum sepenuhnya terpenuhi, sehingga dapat dikatakan hak-hak anak belum sepenuhnya dapat terlindungi. Karena kurang mengertinya masyarakat awam tentang bagaimana aturan hukum itu benar-benar berlaku dan faktor ekonomi khususnya yang menjadikan salah satu alasan tidak terpenuhinya hak-hak anak tersebut.

ABSTRACT

Muhammad Tsabut Su'aifin, 13210188, 2018. *The role of a single parent against fulfillment rights of the child (study in Sukorejo District Sukorejo Sub-district of Blitar Regency)*. Department of Islamic Family Law, Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang.

Advisor: Faridatus Suhadak, M.HI.

Keywords: *Role, Single parent, Rights of the child.*

Being a single parent in a household is certainly not easy. Especially for a wife who was left dead by her husband. In the realization sometimes the victimized child does not get their rights as stated in Law no. 35 Year 2014 on Child Protection Whereas it has been explicitly regulated on the rights of children in the law. Whether it's the right to education, the right to a living, the right to love or other child rights elements. But in reality still not maximal.

The formulation of the problem raised in this research are: 1. How to single parent efforts in fulfilling the rights of the child in Sukorejo District Sukorejo Sub-district of Blitar Regency?, 2. How the fulfillment of children's rights in the perspective of Law no. 35 years 2014 on child protection?.

This research includes into the type of empiricak research (field research). The approach used by the researcher in this study is *case study* which is processed qualitatively. While obtaining and collecting the data used the method of interview and documentation. Then the data analyzed by using descriptive analysis method.

In the result of this study, The role of parents tuggal against the fulfillment of children's rights in Sukorejo District Sukorejo Sub-district of Blitar Regency has fulfilled, post-divorce has not been able to implement the provisions of the protection of children's rights, due to several factors that become obstacles, such as economic limitations, negligence of parents. Understanding the community in carrying out obligations as a parent, especially the perpetrators of divorce is very little proved by the knowledge of the rights of children is only limited to the cost of living alone. So the rights of other children are not met. While the fulfillment of children's right perspective of Law no. 35 of 2014 on protection in the implementation order has not been fully fulfilled, so it can be said that children's rights have not been fully protected. Because it is less likely to understand the general public about how the rule of law really applies and economic factors in particular that make one of the reasons for not fulfilling the rights of the child.

المصطلحات البحث

محمد ثبوت سعييف. 2018.13210188. دور الوالد الوحيد (الأرملة المطلقة) في إعمال حقوق الطفل (دراسة إصابة في قرية فاغو ناحية واتس مديرية كادري). مقال. شعبة الاحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولان مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف : الدكتور فريدة الشهداء الماجستير.

الكلمة الإشارية. دور، الوالد الوحيد ، حقوق الطفل.

من المؤكد أن كون الوالد الوحيد في الأسرة المعيشية ليس سهلاً. خاصة لزوجة تركها زوجها ميتاً. في الإدراك في بعض الأحيان لا يحصل الطفل الضحية على حقوقه كما هو مذكور في القانون رقم. 35 سنة 2014 على حماية الطفل. في حين أنه تم تنظيم صراحة على حقوق الأطفال في القانون. سواء كان ذلك الحق في التعليم ، والحق في العيش ، والحق في الحب أو غيرها من عناصر حقوق الطفل. ولكن في الواقع لا تزال غير القصوى.

صياغة القضايا التي أثرت في هذا البحث هي: 1. كيف يتم جهد الوالد الوحيد (أرمل ميتة مطلقة) في إعمال حقوق الأطفال في مقاطعة سوكوريجو الفرعية في مقاطعة سوكوريجو الفرعية لمدينة بليتار ، 2. كيفية إعمال حق الطفل في ضوء القانون رقم. 35 سنة 2014 على حماية الطفل؟.

ينتمي هذا البحث إلى هذا النوع من الأبحاث التحريية. النهج المستخدم من قبل المؤلفين في هذه الدراسة مع نهج دراسة الحالة التي تتم معالجتها نوعياً. في حين الحصول على البيانات وجمعها باستخدام طريقة المقابلة والتوثيق. ثم البيانات التالية في التحليل باستخدام طريقة التحليل الوصفي.

في هذه الدراسة ، لم يكن دور الوالدين (طلاق الموت) على تحقيق حقوق الأطفال في سوكارجو، مدينة بليتار، بعد الطلاق قادرة على تنفيذ حماية حقوق الأطفال بسبب العديد من القيود ، الاقتصاد ، إهمال الوالدين. إن فهم المجتمع في تنفيذ التزاماته كأحد الوالدين ، وخاصة مرتكبي الطلاق ، لا يثبت إلا بالقليل من المعرفة بحقوق الأطفال الذين يقتصرون على تكلفة المعيشة وحدها. لذلك لم يتم استيفاء حقوق الأطفال الآخرين. في حين أن تحقيق منظور الأطفال الصحيح للقانون لا. 35 من 2014 بشأن الحماية في أمر التنفيذ لم يتم الوفاء بها بالكامل ، لذلك يمكن القول أن حقوق الأطفال لم تكن محمية بالكامل. لأنه من غير المحتمل أن يفهم عامة الناس كيف تطبق سيادة القانون فعلاً والعوامل الاقتصادية على وجه الخصوص هي التي تجعل أحد أسباب عدم إعمال حقوق الطفل.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keluarga merupakan suatu komponen dari unit terkecil di masyarakat. Keluarga yang terdiri dari orang tua dan anak ini tentu memiliki perbedaan baik dari pendapat, pola pikir, dan caranya bertindak. Perbedaan-perbedaan ini terkadang menimbulkan masalah dalam keluarga. Namun masalah dalam keluarga yang tidak segera diselesaikan akan menimbulkan konflik tanpa ujung yang tidak mengenal batasan hingga akhirnya keluarga tersebut tidak bisa lagi dipertahankan.

Ada beberapa masalah dalam keluarga yang sering muncul secepat masalah tersebut menghilang. Hingga terkadang masalah tersebut bisa jadi masalah kambuhan. Mulai dari masalah ekonomi, masalah komunikasi, masalah sosial, masalah privasi, atau bahkan masalah prinsip.

Kondisi semacam ini akan berdampak pada pemenuhan hak anak. Orang tua sebagai penanggung jawab penuh terhadap terpenuhinya hak-hak anak diharuskan untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, kerohanian dan sebagainya yang menunjang terhadap tumbuh kembang kehidupan anak.

Anak memiliki hak-hak yang harus dipenuhi khususnya oleh orang tuanya. Dalam kondisi normal, artinya anak yang tumbuh dalam keluarga lengkap kedua orang tuanya, dan bertanggung jawab penuh memenuhi kebutuhan tumbuh kembang anak sedikit banyak hak-hak tersebut akan

terpenuhi. Namun ada banyak kondisi yang menyebabkan hak-hak anak tidak terpenuhi misalnya penyakit-penyakit keluarga seperti perceraian, perselingkuhan, perzinaan, dan sebagainya memiliki andil yang besar pula dalam menciptakan keterlantaran anak. Untuk itu tanggung jawab terhadap anak sebagai generasipenerus bangsa tidak hanya tanggung jawab orang tua saja, namun merupakan tanggung jawab publik termasuk pemerintah.¹

Dalam hal yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak-hak anak salah satunya yaitu akibat perceraian, yakni cerai mati. Pasca meninggalnya salah satu dari orang tua tentu hak asuh anak akan diemban oleh salah satu dari orang tuanya baik itu bapaknya ataupun ibunya. Menjadi orang tua tunggal dalam sebuah rumah tangga tentu saja tidak mudah. Terlebih bagi seorang istri yang ditinggal oleh suaminya karena meninggal dunia. Dalam perwujudannya anak yang menjadi korban tidak mendapatkan haknya sesuai yang tercantum dalam UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Padahal telah diatur secara eksplisit mengenai hak-hak anak dalam undang-undang tersebut. Baik itu berupa hak pendidikannya, hak nafkahnya, hak kasih sayangnya ataupun unsur-unsur hak anak lain. Walaupun begitu membutuhkan kekuatan lebih untuk membesarkan buah hati baik dari segi moril, materiil maupun spiritualnya.

Kemungkinan anak yang hanya memiliki orang tua tunggal cenderung kurang mampu mengerjakan sesuatu dengan baik dibandingkan anak yang masih memiliki orang tua utuh. Apalagi seorang ibu yang berstatus orang tua

¹ Ratna Kusuma Wardani dan Idaul Hasanah, *Pemenuhan Hak Anak Dalam Poligami*, Jurnal Perempuan dan Anak, 1.

tunggal harus mampu mengatur secara optimal peranannya sebagai seorang ibu bagi anak-anaknya. Ibu juga harus mampu mengkombinasikan dengan baik antara peran domestik dan publik. Dimana harus mencari nafkah juga untuk memenuhi kebutuhan kasih sayang keluarganya, semuanya harus matang dalam menjalankan peran ganda. Dan menjalankan dua peran tersebut bukanlah hal mudah, sudah seharusnya seorang orang tua tunggal untuk tetap menghadirkan sosok ayah atau ibu yang tidak ada selama membesarkan anak-anaknya. Kematangan fisik dan psikologis merupakan faktor yang sangat vital dibutuhkan untuk melakukan manajemen dalam keluarga.

Dari berbagai hal yang dijumpai seputar anak yang hanya diasuh oleh orang tua tunggal tersebut, maka akan menimbulkan dampak yang beragam. Terkhusus dampak ke anak yang kaitannya dalam proses pertumbuhannya kedepan. Terjadi perbedaan antara pertumbuhan anak yang diasuh orang tua tunggal dengan pertumbuhan anak yang diasuh orang tua utuh seperti dalam keluarga pada umumnya. Walaupun dampak tidak selalu kaitannya dengan hal yang negatif. Justru dampak positiflah yang ada jika muncul rasa optimisme dari orang tua tunggal yang mengasuh anak secara mandiri untuk memberikan motivasi tersendiri kepada anaknya.

Keberadaan orang tua tunggal sering kitajumpai di setiap kota besar maupun kota kecil sekalipun, yang menghasilkan pandangan baru dalam sebuah struktur keluarga. Bila Orang tua tunggal ini adalah seorang wanita maka ia akan mengalami perubahan drastis dalam mengatur rumah tangga, yang kini bertambah peran mencari nafkah dan memberikan pendidikan

terhadap anak dalam keluarga. Seperti di Kelurahan Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kota Blitar ini terdapat sedikitnya 5 orang tua tunggal (janda cerai mati), mereka membesarkan anak-anaknya sendiri tanpa bantuan pasangannya, memang susah menyandang status ini ditengah masyarakat yang masih berpikir tradisional. Apalagi di Kelurahan Sukorejo tersebut terdapat suatu lingkungan yang sering terdengar dengan istilah “*kampung seng*”, daerah dengan angka kriminalitas yang tinggi dan kehidupan pinggiran kota. Mulai dari golongan muda hingga golongan tua kehidupan mabuk-mabukan, judi, sabung ayam, parkir liar sudah membudaya. Dan seorang ibu dibenturkan dengan keadaan lingkungan yang seperti itu dengan status janda atau orang tua tunggal yang harus tetap maksimal memberikan nafkah dan nilai-nilai pendidikan ditengah lingkungannya itu. Karena pada hakikatnya konstruk berfikir anak ke depan dimulai dari unit terkecil dalam hidupnya yaitu lingkungan keluarga, baik itu utuh ataupun tidak.

Orang tua tunggal di Kelurahan Sukorejo yang tadinya berstatus “istri” sudah berubah menjadi “janda” bukan berarti pergantian status mereka tidak punya beban yang besar. Mereka harus berjuang mencari nafkah untuk kelangsungan hidupnya serta anak-anaknya, memberi perhatian dalam pendidikan anak, yang dulu itu merupakan tugas “suami” karena mengalami pergeseran semua menjadi alih fungsi. Keadaan tersebut secara otomatis merubah juga status ekonomi seorang menjadi berbeda ketika mereka dalam keadaan lengkap. Permasalahan ini akan lebih berat jika dialami oleh ibu

yang sebelumnya menggantungkan hidup pada seorang suami dan memilih tidak bekerja.

Meskipun telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, pada kenyataannya masih banyak orang tua yang tidak memenuhi hak-hak anaknya tersebut. Baik itu berupa hak pendidikan, hak nafkah, hak kasih sayang ataupun unsur-unsur hak anak lain. Seperti kasus ibu yang seharusnya setiap saat menjaga, merawat dan memberikan hak-hak anak yang seharusnya dipenuhi, lebih banyak menghabiskan waktunya di tempat kerja dan cenderung melalaikan kewajibannya terhadap pemenuhan hak-hak anaknya. Selain itu anak yang seharusnya memperoleh hak pendidikan seperti disekolahkan, mereka tidak mendapatkan hak tersebut. Hak anak yang seharusnya beristirahat dan bermain dengan teman sebayanya, tidak terpenuhi juga karena harus ikut ibunya bekerja. Dan penyebab semuanya itu karena kendala faktor ekonomi keluarganya yang minim.

Pemahaman masyarakat dalam melaksanakan kewajiban sebagai orang tua terutama pelaku perceraian ini sangat minim terbukti dengan pengetahuan hanya sebatas hak anak tentang biaya hidup saja. Oleh karena itu perlu dikaji prinsip hukum tentang Pelaksanaan pemenuhan hak hak anak pasca perceraian selama ini belum mampu untuk melaksanakan ketentuan perlindungan hak anak, disebabkan beberapa faktor yang menjadi kendala, antara lain keterbatasan ekonomi dan kelalaian orang tua. Maka dari itu perlu dikaji prinsip hukum tentang pelaksanaan pemenuhan hak anak pasca

perceraian yang selama ini belum mampu melaksanakan ketentuan perlindungan hak anak.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya orang tua tunggal (janda cerai mati) dalam memenuhi hak anak di Kelurahan Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kota Blitar?
2. Bagaimana upaya pemenuhan hak anak dalam perspektif UU No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan upaya orang tua tunggal (janda cerai mati) dalam memenuhi hak anak di Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar.
2. Untuk mendeskripsikan upaya pemenuhan hak anak dalam perspektif UU No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, diharapkan penelitian ini memiliki manfaat teoritis maupun praktis dalam aplikasinya di dunia pendidikan maupun masyarakat. Adapun manfaat yang akan dihasilkan dari penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Menjadikan kerangka konseptual bagi orang tua tunggal (janda cerai mati) dalam pemenuhan hak anak di lingkungan Kelurahan Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kota Blitar.

- b. Dapat digunakan sebagai referensi pendukung bagi peneliti yang akan melakukan penelitian dengan tema penelitian yang sama di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

Dapat dijadikan sebagai masukan dan sumber wacana bagi orang tua tunggal pada umumnya.

E. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, penulis menjelaskan beberapa definisi yang erat kaitannya dengan judul proposal skripsi ini.

1. *Peranan* adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.² Bagi kami peranan bisa diartikan sebagai tindakan yang menyebabkan orang tersebut bisa menjalankan fungsinya.
2. *Orang tua tunggal (janda cerai mati)* adalah orang tua yang hanya terdiri dari satu orang saja, dimana di dalam rumah tangga ia berperan sebagai ibu dan juga berperan sebagai ayah. Kami mengartikan orang tua tunggal (janda cerai mati) ini merupakan sebuah peran yang diambil oleh seorang ibu karena telah ditinggal mati oleh suami atau ayah dari anak-anaknya.
3. *Hak* adalah kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu.³ Sedangkan *anak* adalah keturunan yang kedua.⁴ Jadi hak anak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan atau diterima oleh anak dan

²Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), 667.

³Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), 292.

⁴Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), 30.

apabila tidak diperoleh, anak berhak menuntut hak tersebut. Dalam hal ini yang wajib memenuhi, menjamin serta melindungi adalah orang tua, keluarga, masyarakat dan pemerintah.

F. Sistematika Penulisan

Dalam rangka memperjelas terkait arah dan tujuan penulisan, maka secara garis besar dapat digunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA berisi tentang penelitian terdahulu dan kajian pustaka mengenai pengertian keluarga, pengertian orang tua, kewajiban orang tua, pengertian anak, hak anak dalam perspektif Islam, dan hak anak dalam UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

BAB III METODE PENELITIAN merupakan pembahasan mengenai metodologi penelitian seperti jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumberdata yang digunakan penulis dalam mencari sebuah data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Bab ini merupakan inti dari penelitian karena pada bab ini akan memaparkan data, kemudian menganalisis data-data baik melalui data primer maupun data sekunder untuk menjawab rumusan masalah yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini.

BAB V PENUTUP bab ini merupakan bab akhir dari sebuah penelitian dimana pada bab ini peneliti memberikan kesimpulan yang menjelaskan tentang inti pokok dari permasalahan dan jawaban dari rumusan masalah yang ada di BAB IV, selain memberikan kesimpulan, peneliti juga menambahkan saran terkait dengan hasil penelitian untuk dijadikan bahan evaluasi penelitian kedepannya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam menentukan sebuah penelitian tentu melewati tahapan analisis mengenai sudah pernahkah objek penelitian diteliti oleh pihak lain. Maka dari itu menjadi penting menampilkan sisi penelitian terdahulu supaya bisa menjadi acuan antara yang akan diteliti dengan objek penelitian pihak lain yang memiliki kemiripan. Berikut hasil penelusuran mengenai penelitian terdahulu:

1. Taufik, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014, judul *Dampak Pola Asuh Single Parent Terhadap Tingkah Laku Beragam Remaja (Studi Kasus Dua Remaja Pada Dua Keluarga Single Parent di Dusun Kuden, Siti Mulyo, Piyungan, Bantul)*.⁵ Persamaan dengan peneliti ini adalah sama sama mengkaji mengenai single parent. Meskipun dijumpai kesamaan terkait subyek yang dikaji namun ada perbedaan terkait objek yang dikaji yaitu remaja sedangkan peneliti ini meneliti anak. Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa bentuk dan metode pola asuh ibu sebagai orang tua tunggal terhadap anak lebih bersifat demokratis-otoriter. Demokratis di dalam aktivitas yang berkaitan dengan hal-hal praktis. Sedangkan otoriter kearah hal yang bersifat prinsipal. Sedangkan dampak pola asuh ibu sebagai orang tua tunggal terhadap tingkah laku beragama anak dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu pertama membentuk motif dan

⁵Taufik, *Dampak Pola Asuh Single Parent Terhadap Tingkah Laku Beragam Remaja (Studi Kasus Dua Remaja Pada Dua Keluarga Single Parent di Dusun Kuden, Siti Mulyo, Piyungan, Bantul)*, (Yogyakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014).

rasio anak dalam bertindak menjalankan tuntunan agama, kedua membentuk pola aktivitas beragama sehari-hari anak (sholat wajib lima waktu, mengaji) dan ketiga adalah membimbing anak dalam menginternalisasi sistem etika yang berlaku di lingkungan, terutama lingkungan masyarakat (interaksi dengan orang lain).

2. Sirajudin, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011, judul *Pemenuhan Hak-Hak anak pasca perceraian Orang Tua Di Desa Bonder Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah NTB*.⁶Persamaan dengan peneliti ini adalah objek yang diteliti yakni pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian. Perbedaannya peneliti sebelumnya lebih meneliti ke area pasca perceraian orang tua sedangkan peneliti ini meneliti terkait Peranan Orang Tua Tunggal (Janda cerai mati) Terhadap Pemenuhan Hak Anak. Dalam tesis ini menjelaskan bahwa pola pemenuhan hak-hak anak oleh orang tua dalam memenuhi hak-hak anaknya selama ini masih jauh kesesuaiannya dengan ketentuan undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak bahwa hakikat yang sesungguhnya adalah menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hambatan dalam memenuhi hak-hak anak pasca perceraian di Desa Bonder adalah keterbatasan ekonomi orang tua, kelalaian orang tua, rendahnya pendidikan orang tua, kurangnya kesadaran

⁶Sirajudin, *Pemenuhan Hak-Hak anak pasca perceraian Orang Tua Di Desa Bonder Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah NTB*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011).

akan tanggung jawab sebagai orang tua. Implikasi tidak terpenuhinya hak-hak anak pasca perceraian orang tua terhadap kehidupan anak di Desa Bonder adalah anak menjadi minder, konflik bathin, prestasi menurun, malas, kurang berinteraksi, nakal, kurang bisa beradaptasi, melawan/membantah orang tua.

3. Dewi Fitriyana, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016, judul *Pemenuhan Hak-Hak Hadhanah Anak Pasca Perceraian ditinjau dari UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Dusun Banjarwaru Desa Kelir Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi)*.⁷ Persamaan dengan peneliti ini adalah sama-sama membahas terkait pemenuhan hak-hak anak. Perbedaannya peneliti sebelumnya membahas mengenai pemenuhan hak-hak *hadhanah* anak pasca perceraian sedangkan peneliti ini meneliti terkait Peranan Orang Tua Tunggal (Janda cerai mati) Terhadap Pemenuhan Hak Anak. Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa pemenuhan hak pemenuhan anak belum sepenuhnya terpenuhi, dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hak anak itu sendiri, sedangkan implikasi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 dan Kompilasi Hukum Islam terhadap pemenuhan hak-hak *hadhanah* anak pasca perceraian belum sepenuhnya dijadikan sebagai landasan, dirasa masih banyak hak-hak anak yang telah dituangkan dalam undang-undang belum sepenuhnya terpenuhi, dengan

⁷Dewi Fitriyana, *Pemenuhan Hak-Hak Hadhanah Anak Pasca Perceraian ditinjau dari UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Dusun Banjarwaru Desa Kelir Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi)*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016).

tidak terpenuhinya hak-hak anak disini muncullah permasalahan penelantaran anak.

Tabel 1.1: Penelitian Terdahulu

NAMA PENELITI	JUDUL	PERBEDAAN	PERSAMAAN
Taufik, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.	Dampak Pola Asuh Single Parent Terhadap Tingkah Laku Beragam Remaja (Studi Kasus Dua Remaja Pada Dua Keluarga Single Parent di Dusun Kuden, Siti Mulyo, Piyungan, Bantul).	Objek yang dikaji yaitu remaja sedangkan peneliti ini meneliti anak dan peranan orang tua tunggal.	Sama-sama mengkaji mengenai single parent.
Sirajudin, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011	<i>Pemenuhan Hak-Hak anak pasca perceraian Orang Tua Di Desa Bonder Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah NTB</i>	peneliti sebelumnya lebih meneliti ke area pasca perceraian orang tua sedangkan peneliti ini meneliti terkait Peranan Orang Tua Tunggal (Janda cerai mati) Terhadap Pemenuhan Hak Anak	Objek yang di teliti yakni pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian.

Dewi Fitriyana, Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016.	Pemenuhan Hak- Hak <i>Hadhanah</i> Anak Pasca Perceraian ditinjau dari UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Dusun Banjarwaru Desa Kelir Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi)	Membahas mengenai pemenuhan hak-hak <i>hadhanah</i> anak pasca perceraian	Mebahas terkait pemenuhan hak-hak anak
---------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------

B. Kajian Pustaka

1. Pengertian Keluarga

Sudah menjadi aksioma bahwa keluarga adalah sel hidup utama yang membentuk organ tubuh masyarakat. Jika keluarga baik, masyarakat secara keseluruhan akan ikut baik dan jika keluarga rusak, masyarakatpun ikut rusak. Bahkan keluarga adalah miniatur umat yang menjadi sekolah pertama bagi manusia dalam mempelajari etika sosial yang terbaik. Sehingga tidak ada umat tanpa keluarga, bahkan tidak ada masyarakat humanisme tanpa keluarga.⁸

Urgensi dan keluhuran status keluarga bertumpu pada kenyataan bahwa keluarga merupakan milieu sosial pertama dan satu-satunya yang menyambut manusia sejak kelahiran, selalu bersama sepanjang hidup, ikut menyertai dari

⁸Mahmud Muhammad Al-Jauhari dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal, *Membangun Keluarga Qur'ani Panduan Untuk Wanita Muslimah*, (Jakarta: Amzah, 2005), 3.

satu fase ke fase selanjutnya. Bahkan, tidak ada sistem sosial lain pun yang bisa menentukan nasib manusia secara keseluruhan sebagaimana keluarga.⁹

Keluarga merupakan kelembagaan (institusi) primer yang sangat penting dalam kehidupan manusia, baik sebagai individu maupun masyarakat. Setiap individu berangkat dari sistem sosial keluarga, sebelum ia memasuki sistem sosial yang lebih besar yaitu masyarakat. Keluarga merupakan sebuah institusi terkecil di dalam masyarakat yang berfungsi sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang tentram, aman, damai dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang diantara anggotanya.¹⁰ Suatu ikatan hidup yang didasarkan karena terjadinya perkawinan, juga bisa disebabkan karena persusuan atau muncul perilaku pengasuhan. Selain itu keluarga juga subsistem (unit) kelembagaan terkecil dalam sistem sosial yang lebih besar, seperti masyarakat, bangsa, negara. Oleh karena itu tidak berlebihan apabila ungkapan, “Sumber kekuatan dan kesejahteraan suatu bangsa adalah kekuatan dan kesejahteraan keluarga”.¹¹

Untuk meningkatkan kekuatan dan kesejahteraan keluarga diperlukan ilmu pengetahuan tentang berbagai aspek yang menyangkut kehidupan keluarga, baik pola interaksi antar individu dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Fungsi keluarga ialah sebagai pengantar pada masyarakat dan penghubung pribadi-pribadi dengan struktur sosial yang lebih besar.

⁹Mahmud Muhammad Al-Jauhari dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal, *Membangun Keluarga*, 3.

¹⁰Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2013), 33.

¹¹Hendi, Suhandi, *Penngantar Studi Sosiologi Keluarga*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 44.

Fungsionalisme struktural atau analisa sistem pada prinsipnya berkisar pada beberapa konsep, namun yang paling penting adalah konsep fungsi dan konsep struktur. Fungsi juga menunjuk pada proses yang sedang atau yang akan berlangsung, yaitu menunjukkan pada benda tertentu yang merupakan elemen atau bagian dari proses tersebut, sehingga terdapat perkataan "masih berfungsi" atau "tidak berfungsi." Fungsi tergantung pada predikatnya, misalnya pada fungsi mobil, fungsi rumah, fungsi organ tubuh. Secara kuantitatif, fungsi dapat menghasilkan sejumlah tertentu, sesuai dengan target, proyeksi, atau program yang telah ditentukan. Teori ini sesungguhnya sangat sederhana, yakni bagaimana memandang masyarakat sebagai sistem yang terdiri atas bagian yang saling berkaitan (agama, pendidikan, stuktur politik sampai rumah tangga).¹²

Keluarga memegang peranan kunci dalam sosialisasi berlangsung. Peran dan nilai sosial yang berfungsi untuk mempertahankan kelangsungan sistem sosial diajarkan pada anggotanya. Dalam keluarga inilah posisi perempuan ditempatkan, karena setiap sistem itu mempunyai ketegangan dan keseimbangan. Peran perempuan sebagai ibu rumah tangga dan sebagai wanita yang bekerja diluar rumah dikatakan fungsional jika kedua perannya dapat dijalankan seimbang. Sedangkan dikatakan disfungsional jika kedua perannya terjadi ketimpangan. Kedua peran yang dijalankan oleh orang tua tunggal memiliki dua konsep kultural yaitu lingkungan domestik dan lingkungan publik. Pada lingkungan domestik dihadapkan dengan urusan-

¹²Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transfirmasi Sosial*, (Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 2008), 66.

urusan keluarga sedangkan pada lingkungan publik mereka dihadapkan dengan berbagai macam persoalan di masyarakat.

2. Macam Keluarga

a. Jenis Perkawinan

- 1) Monogami adalah keluarga dimana terdapat seorang suami dengan seorang istri.
- 2) Poligami adalah keluarga dimana terdapat seorang suami dengan lebih dari satu istri.¹³ Kata poligami berasal dari Bahasa Yunani, *Polus*; dan *Gamos*. *Polus* berarti banyak sedangkan *Gamos* bermakna perkawinan. Dengan demikian poligami adalah sistem perkawinan yang menempatkan seorang laki-laki atau perempuan yang memiliki pasangan lebih dari satu orang dalam satu waktu.¹⁴

b. Garis Keturunan

- 1) Keturunan unilateral, yakni keturunan melalui satu garis saja laki-laki atau perempuan yang terbagi dalam tiga bentuk:
 - Keturunan patrilineal, keturunan yang ditelusuri melalui garis laki-laki.
 - Keturunan matrilineal, keturunan yang ditelusuri melalui garis ibu.
 - Keturunan ganda, keturunan yang ditelusuri melalui garis laki-laki dan garis perempuan.

¹³Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), 779.

¹⁴Istibsyaroh, *Poligami dalam Cita dan Fakta*, (Bandung: Blantika, 2004), 2.

- 2) Keturunan kognatik yakni sistem laki-laki dan perempuan digunakan untuk menetapkan kelompok keturunan yang mencakup:
 - Keturunan ambilineal, dimana persekutuan kelompok keturunan dibentuk dengan menelusuri hubungan laki-laki dan perempuan.
 - Keturunan bilateral, dimana keturunan ditelusuri melalui sanak saudara dalam hubungan laki-laki dan perempuan sekaligus.¹⁵

c. Anggota Keluarga

- 1) Keluarga inti (*Nuclear Family*) adalah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak.
- 2) Keluarga besar (*Extended Family*) adalah keluarga inti ditambahkan dengan sanak saudara. Misalnya: kakak, nenek, keponakan, dan lain-lain.
- 3) Keluarga Berantai (*Serial Family*) adalah keluarga yang terdiri dari wanita dan pria yang menikah lebih dari satu kali dan merupakan satu keluarga inti.
- 4) Keluarga duda/janda (*Single Family*) adalah keluarga yang terjadi karena perceraian atau kematian.
- 5) Keluarga berkomposisi (*Composite*) adalah keluarga yang perkawinannya berpoligami dan hidup secar bersama.
- 6) Keluarga kabitas (*Cahabitation*) adalah dua orang yang terjadi tanpa pernikahan tetapi membentuk suatu keluarga.¹⁶

d. Permukiman

Aturan keluarga berdasarkan *residence* dapat dikategorikan:

¹⁵Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam*, 40.

¹⁶<https://www.kajianpustaka.com/2012/11/definisi-fungsi-dan-bentuk-keluarga.html>, dikases pada tanggal 11 April 2018, 20:29 WIB

- 1) Patrilokaitas, pasangan nikah tinggal dalam rumah tangga ayah suami.
- 2) Matrilokalitas, pasangan nikah tinggal dalam rumah tangga ibu istri.
- 3) Avankulokalitas, pasangan nikah tinggal dalam rumah tangga saudara laki-laki ibu dari suami.
- 4) Bilokalitas, pasangan nikah secara bergantian tinggal diantara kelompok kerabat suami-istri.
- 5) Ambilokalitas, pasangan nikah memilih untuk tinggal diantara kelompok kerabat suami atau kerabat istri.
- 6) Natolokalitas, pasangan nikah tidak tinggal bersama, masing-masing tinggal dimana masing-masing dilahirkan.
- 7) Neolokalitas, pasangan nikah menentukan tempat tinggal secara mandiri tidak terikat oleh rumah tangga ayah, ibu, atau kerabat lainnya.¹⁷

e. Kekuasaan

- 1) *Patriakal* adalah keluarga yang dominan dan memegang kekuasaan dalam keluarga adalah di pihak ayah.
- 2) *Matrikal* adalah keluarga yang dominan dan memegang kekuasaan dalam keluarga adalah pihak ibu.
- 3) *Equalitarium* adalah keluarga yang memegang kekuasaan adalah ayah dan ibu.¹⁸

3. Pengertian Orang Tua

Orang tua adalah ayah dan/atau ibu seorang anak, baik melalui hubungan biologis maupun sosial. Umumnya, orang tua memiliki peranan

¹⁷Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam*, 39-40.

¹⁸<https://www.kajianpustaka.com/2012/11/definisi-fungsi-dan-bentuk-keluarga.html>, dikases pada tanggal 11 April 2018, 20:29 WIB

yang sangat penting dalam membesarkan anak, dan panggilan ibu/ayah dapat diberikan untuk perempuan/pria yang bukan orang tua kandung dari seseorang yang mengisi peranan ini. Contohnya adalah pada orang tua angkat (karena adopsi) atau ibu tiri (istri ayah biologis anak) dan ayah tiri (suami ibu biologis anak).

Orang tua merupakan setiap orang yang bertanggung jawab dalam suatu keluarga atau tugas rumah tangga yang dalam kehidupan sehari-hari disebut sebagai bapak dan ibu. Jika menurut Hurlock, orang tua merupakan orang dewasa yang membawa anak ke dewasa, terutama dalam masa perkembangan. Tugas orang tua melengkapi dan mempersiapkan anak menuju ke kedewasaan dengan memberikan bimbingan dan pengarahan yang dapat membantu anak dalam menjalani kehidupan. Dalam memberikan bimbingan dan pengarahan pada anak akan berbeda-beda pada masing-masing orang tua karena setiap keluarga memiliki kondisi-kondisi tertentu yang berbeda corak dan sifatnya antara keluarga yang satu dengan keluarga yang lain.

4. Kedudukan Orang Tua

Keluarga merupakan unit terkecil dalam struktur masyarakat yang dibangun di atas perkawinan/pernikahan terdiri dari ayah/suami, ibu/istri dan anak.¹⁹ Pernikahan, sebagai salah satu proses pembentukan suatu keluarga, merupakan perjanjian sakral (*mitsaqan ghalidha*) antara suami dan istri. Perjanjian sakral ini, merupakan prinsip universal yang terdapat dalam

¹⁹Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam*, 34

semua tradisi keagamaan. Dengan ini pula pernikahan dapat menuju terbentuknya rumah tangga yang sakinah.

Orang tua yang dimaksud disini adalah ayah dan ibu. Ayah mempunyai kedudukan sebagai kepala rumah tangga atau kepala keluarga. Disamping sebagai pendamping istri, ia pemimpin bagi keluarganya. Sedangkan ibu sebagai partner bagi suaminya dalam membimbing putra-putrinya, sehingga orang tua harus dapat menjadi suri tauladan putra-putrinya dalam segala segi, karena keluarga merupakan lembaga pendidikan yang pertama dan utama bagi anak-anak, maka orang tua merupakan pondasi kehidupan bagi anggota keluarga.

Dalam keluarga kedudukan ibu dan bapak terhadap anak adalah laksana akar pohon terhadap cabang-cabangnya, sebagaimana kehidupan dan perkembangan cabang-cabang pohon tergantung pada akar-akarnya.

Selain itu orang tua yang shalih merupakan suri tauladan yang baik bagi perkembangan jiwa anak yang sedang tumbuh, karena pengaruh mereka sangat besar sekali dalam pendidikan anak. Apabila orang tua sudah berperilaku dan berakhlak baik dan taat kepada Allah SWT, menjalankan syariat agama Islam dan berjuang sepenuhnya di jalan Allah SWT serta memiliki jiwa sosial, maka dalam diri jiwa anakpun akan mulai terbentuk dan tumbuh dalam ketaatan pula dan mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh orang tuanya dalam perilaku mereka sehari-hari.²⁰

²⁰Muhammad Nur Abdul Hanifah, *Mendidik Anak Bersama Rasulullah*, (Bandung: al-Bayan, 1997), 65.

Jadi, keluarga merupakan unit sosial terkecil yang memberikan pondasi primer bagi perkembangan bagi tingkah laku anak. Maka baik buruknya keluarga ini memberikan dampak yang positif atau negatif pada diri anak menuju kepada tingkah laku baik.

5. Kewajiban Orang Tua

1) Kewajiban Orang Tua dalam Islam

Agar anak sebagai generasi penerus dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan cara-cara keluarga, dibutuhkan adanya bimbingan dari orang tua dalam rangka mendewasakan mereka, agar mampu merealisasikan ajaran-ajaran Islam sehingga orang tua wajib menerangkan makna dakwah (dalam arti sempit), terhadap anak-anaknya, disamping kepada orang lain. Karena Islam mengajarkan agar lebih diutamakan dalam berdakwah adalah keluarga terdekatnya, kemudian baru orang lain, sebagaimana firman Allah SWT QS. as-Syu'ara Ayat 214 berbunyi:²¹

وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ

*Artinya: “Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu (Muhammad) yang terdekat”.*²²

Ayat ini berkaitan erat dengan firman Allah SWT dalam ayat lain QS. At-Tahrim Ayat 6.²³

²¹QS. As-Syu'ara (26): 214.

²²Al-qur'an Tajwid Dan Terjemahan, Maghfiroh Pustaka.

²³QS. At-Tahrim (66): 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا
يُؤْمَرُونَ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan".²⁴

Bersamaan dengan perkembangan usia dan kedewasaan, seorang anak mulai mengenal dan menyerap tata nilai masyarakatnya, seperti: akidah, ibadah, akhlak dan lain-lain. Semua itu relatif mudah diajarkan dalam kehidupan sehari-hari, karena anak-anak bisa mendapatkan petunjuk secara langsung dari ayah ibunya. Sehingga terbentuknya jiwa anak sangat tergantung oleh pengarahan dan bimbingan dari kedua orang tuanya.

Sebagaimana sabda Rasulullah yang artinya:

“Dari Abu Hurairah ra. Bahwa Rasulullah saw bersabda: Tidaklah dilahirkan seorang anak, melainkan atas fitrah (dalam keadaan suci). maka kedua orang tuanyalah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi (HR Muslim).²⁵

Berdasarkan hadits tersebut diatas, maka orang tua wajib mengajarkan tata nilai tersebut sejak dini, baik yang wajib maupun yang sunnah guna menuju pada perangai utama, budi luhur, agar anak-anak dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan diakhirat.

²⁴ Al-qur'an Tajwid Dan Terjemahan, Maghfiroh Pustaka.

²⁵ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Juz 1V, (Singapura, Sulaiman Mara'i), 2074.

Diantara kewajiban-kewajiban terpenting orang tua terhadap anak-anaknya adalah:

- a. Bahwa si Bapak memilih istri yang bakal menjadi ibu bagi anak-anaknya ketika ia berniat hendak kawin. Sebab itu mempunyai pengaruh besar pada pendidikan anak-anak pada tingkah laku mereka, terutama pada awal masa anak-anak, dimana ia tidak mengenal siapa-siapa kecuali ibunya yang menyediakan makan atau minuman untuknya, kasih sayang dan kecintaan.
- b. Ia memilih nama yang baik bagi anaknya, terutama jika ia adalah seorang laki-laki, sebab nama yang baik itu mempunyai pengaruh positif atas kepribadian manusia, bangsa juga atas tingkah laku, cita-cita dan angan-angannya.
- c. Memperbaiki adang pengajaran anak-anaknya dan menolong mereka membina akidah yang betul dan agama yang kokoh, ia juga harus memberikan peluang suasana praktis untuk mengamalkan nilai-nilai agama dan akhlak dalam kehidupan.
- d. Orang lain juga harus memuliakan anak-anaknya berbuat adil dan kebaikan diantara mereka.
- e. Orang tua bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain dalam masyarakat yang berusaha menyadarkan dan memelihara anak-anak dari segi kesehatan, akhlak dan sosial, juga melindungi mereka dari segala yang membahayakan badan dan akalnja juga mengembangkan dan membuka kesediaan-kesediaan, bakat-bakat, kesanggupan-kesanggupan dan niatnya. Ia juga harus memelihara perbedaan-perbedaan perseorangan diantara anak-anaknya dengan anak-anak yang lain.
- f. Supaya orang tua memberikan contoh yang baik dan tauladan yang shalih atas segala yang diajarkan ia juga harus menyediakan suasana rumah tangga yang shalih, penuh dengan rasa kemanusiaan yang mulia, bebas dari kerisauan dan pertarungan keluarga dalam soal pendidikan anak-anak.²⁶

Sedangkan pendapat yang lain bahwa diantara kedua orang tua dan para pendidik yaitu:

- a. Membiasakan anak supaya mengingat keagungan dan nikmat Allah SWT. Mencari dalil atas keesaanNya serta menafsirkan gejala-gejala alam yang berupa dingin, panas, malam, siang, gempa, badai, dan sebagaimana dengan penafsiran yang mengukuhkan ini, guna merealisasikan kesecian fitrah anak serta kesimpulannya untuk mentauhidkan dan mengagungkan Allah SWT.
- b. Menampakkan keteguhan sikap dihadapan anak di dalam menghadapi berbagai penyimpangan orang sesat, orang yang dimurkai, orang-orang musyrik dan para pengikutnya, penyimpangan tersebut seperti

²⁶Hasan Langgulang, *Manusia dan Pendidikan*, Cet. I, (Jakarta: al-Husna, 1956), 380-384.

kedzaliman hidup tidak bermoral, kemewahan dan sebagainya. Berbagai dampak buruk itu diungkapkan melalui cerita, percakapan atau pemberian teladan.²⁷

Untuk merealisasikan semuanya itu, akan jelas lebih mudah kalau dimulai dari keluarganya sendiri, yaitu dengan cara mendidik dan membina anak-anak agar mereka mampu berfikir dan memiliki kepribadian yang Islami yaitu sikap dan tingkah lakunya selalu mencerminkan akhlak yang mulia. Sehingga anak akan tetap memegang tegung fitrah keislamannya. Oleh karena itu orang tua harus mengajak kepada latihan-latihan keagamaan yang menyangkut ibadah, seperti sembahyang (shalat), membaca do'a, membaca Al-Qur'an (menghafal ayat-ayat atau surat-surat pendek), berpuasa dan lain sebagainya. Anak diajak untuk selalu membiasakan shalat sejak dini mungkin. Sehingga lama-kelamaan akan tumbuh rasa senang melakukan ibadah tersebut. Keluarga mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap agama, akhlak atau moral dan sosial yang harus ditunaikan dengan sebaik-baiknya untuk menyiapkan anggota-anggotanya memasuki kehidupan yang selalu mematuhi dan berpegang teguh kepada ajaran agama, sehingga keberadaan orang tua sangat signifikan, karena mereka diharapkan dengan sungguh-sungguh membimbing anaknya baik dalam bidang akidah, ibadah, maupun muamalah. Dengan kata lain pembentukan pribadi muslim yang berakhlakul karimah selalu dimulai dari lingkungan keluarganya.

Dengan demikian dapat kami simpulkan bahwa kewajiban orang tua terhadap anaknya tidak hanya terbatas pada bidang pendidikan saja. Namun

²⁷Abdurrahman an Nahlawi, *Prinsip-Prinsip dan Metode Pendidikan Islam*, (Bandung: Diponegoro, 1984), 201-202.

orang tua juga wajib melindungi anak-anaknya dari kerugian, kejahatan, siksaan api neraka, ia juga wajib memelihara keselamatan hidupnya, baik moril maupun materiilnya sampai anak mampu berdiri sendiri (mandiri) atau dewasa, baik secara fisik sosial, ekonomi maupun moral.²⁸

2) Kewajiban Orang Tua dalam Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014

Adapun kewajiban orang tua kepada anak dijabarkan dalam Pasal 26 Ayat 1 UU Perlindungan Anak. Berikut ini beberapa kewajiban orang tua terhadap anak:

1. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak-anaknya.
2. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.
3. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.
4. Mencegah perkawinan dini pada usia anak-anak.²⁹

Apabila terjadi pelanggaran atas hak-hak anak, misalnya didalam sebuah keluarga terjadi perpecahan antara ayah dan ibu. Lalu, kedua orang tua bercerai dan hidup masing-masing tanpa memikirkan kehidupan anak. Anak di biarkan hidup tanpa kasih sayang ataupun bimbingan mereka. Meskipun dirawat oleh saudara ataupun kakek atau neneknya, tetap saja menjadi perkara penelantaran anak. Atau apabila terjadi kekerasan terhadap anak oleh orang tua, maka akan menjadi kasus pidana.³⁰

Apabila kasus tersebut benar-benar terjadi, maka orang tua baik ayah atau ibu yang menelantarkan anak hingga jatuh sakit dan menderita secara

²⁸Di Dun Hafifuddin, *Dakwah Aktual*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 1998), 168.

²⁹Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 6.

³⁰Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak,

fisik, mental, maupun sosial akan di pidana 5 tahun penjara dan denda paling besar Rp. 100.000.000,00. Ini sesuai ketentuan hukum dalam Pasal 77 UU Perlindungan Anak.³¹

Selain dilindungi oleh UU Perlindungan Anak, hak anak juga tertanam sebagai hak-hak asasi yang wajib diberikan seperti untuk mendapatkan pendidikan dan kehidupan yang layak. Jadi, hak seorang anak adalah penting untuk dipenuhi sekalipun anak tersebut bermasalah atau melakukan tindak pidana.³²

Didalam Undang-undang perkawinan mengatur kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya meskipun rumah tangga telah putus karena perceraian. Kewajiban orang tua meliputi :

- a. Orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
- b. Orang tua mewakili anak mengenai perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan;
- c. Sebagaimana diatur dalam Pasal 41 UU Perkawinan dijelaskan bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, bila mana bapak tidak dapat memenuhi kewajibannya, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya pemeliharaannya dan pendidikan yang di perlukan anak, kewajiban tersebut tetap berlaku meskipun kekuasaan sebagai orang tua dicabut.³³

Dari penjelasan diatas bahwa kewajiban orang tua yang dimaksud tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, meskipun perkawinan kedua orang tua putus³⁴. Bapak dan ibu wajib memelihara dan

³¹Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 20.

³²www.bimarasolusindo.co.id/kewajiban-orangtua-kepada-anak-anaknya/, diakses pada tanggal 07 Maret 2018, 11:29 WIB

³³ http://repository.radenintan.ac.id/1360/5/BAB_IV.pdf

³⁴ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), 188.

mendidik anak mereka yang belum dewasa, walaupun hak untuk memangku kekuasaan orang tua atau hak menjadi wali hilang, tidaklah mereka bebas dari kewajiban untuk memberi tunjangan yang seimbang dengan penghasilan mereka untuk membiayai pemeliharaan dan pendidikan anaknya³⁵.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang kewajiban orang tua terhadap anak terdapat dalam pasal 77 KHI yang menyebutkan:

- a. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat;
- b. Suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya;
- c. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya;
- d. Suami istri wajib memelihara kehormatannya.

Jika suami istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.³⁶

6. Pengertian Anak

1) Pengertian Anak dalam Islam

Anak merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa wajib dilindungi dan dijaga kehormatan, martabat dan harga dirinya secara wajar, baik aspek secara hukum, ekonomi, politik, sosial, maupun budaya tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan. Anak adalah generasi penerus bangsa yang akan sangat menentukan nasib dan masa depan bangsa secara

³⁵ Hilman Hadikesuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung; Mandar Maju, 2007), 131.

³⁶ Kompilasi Hukum Islam Pasal 77

keseluruhan di masa yang akan datang. Anak harus dijamin hak hidupnya untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan fitrah dan kodratnya, oleh karena itu segala bentuk perlakuan yang mengganggu dan merusak hak-hak anak dalam berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi yang tidak berprikemanusiaan harus dihapuskan tanpa kecuali.³⁷

Rasulullah saw mengajarkan bahwa ada dua hal potensial yang akan mewarnai dan membentuk kepribadian anak yaitu orang tua yang melahirkannya dan lingkungan yang membesarkannya. Fenomena yang terjadi saat ini, tidak sedikit keluarga yang memiliki filosofi keliru tentang eksistensi anak. Seringkali keluarga yang hanya memiliki filosofi bahwa kehadiran anak semata-mata akibat logis dari hubungan biologis kedua orang tuanya, tanpa memiliki landasan ilmu dan makna arahan keberadaan anugerah anak.

Berkaitan dengan eksistensi anak, al-Qur'an menyebutnya dengan beberapa istilah antara lain:

a. Perhiasan atau Kesenangan

Firman Allah SWT dalam QS. Al-Kahfi Ayat 46.³⁸

الْحَمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ شَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

Artinya: "Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal kebajikan yang terus menerus adalah lebih baik

³⁷Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam*, 269.

³⁸QS. Al-Kahfi (18): 46

*pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.”*³⁹

b. Musuh

Firman Allah SWT dalam QS. At-Tagabun Ayat 14.⁴⁰

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ
وَإِنْ تَسْأَلُوهُم بِمَا نَصَفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

*Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya diantara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka dan jika kamu maafkan dan kamu santuni serta ampuni (mereka), Maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”*⁴¹

c. Fitnah

Firman Allah SWT dalam QS. At-Tagabun Ayat 15.⁴²

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ۖ وَاللَّهُ عِنْدَهَا جَزَاءٌ عَظِيمٌ

*Artinya: “Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan di sisi Allah adalah pahala yang besar”.*⁴³

d. Amanah

Firman Allah SWT dalam QS. Al Anfal Ayat 27-28.⁴⁴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-

³⁹Al-qur'an Tajwid Dan Terjemahan, Maghfiroh Pustaka.

⁴⁰QS. At-Tagabun (64): 14

⁴¹Al-qur'an Tajwid Dan Terjemahan, Maghfiroh Pustaka.

⁴²QS. At-Tagabun (64): 15.

⁴³Al-qur'an Tajwid Dan Terjemahan, Maghfiroh Pustaka.

⁴⁴QS. Al-Anfal (8): 27-28.

*anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar”.*⁴⁵

e. Penentram dan Penyejuk Hati

Firman Allah SWT dalam QS. al-Furqan Ayat 74.⁴⁶

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْ لَنَا
لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

*Artinya: “Dan orang-orang yang berkata, “Wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa”.*⁴⁷

2) Pengertian Anak Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35

Tahun 2014

Pengertian anak dalam kaitannya dengan perilaku delinkuensi anak, biasanya dilakukan dengan mendasarkan pada tingkatan usia, dalam arti tingkat usia berapakah seorang dapat dikategorikan sebagai anak.⁴⁸ Anak memiliki karakteristik khusus (spesifik) dibandingkan dengan orang dewasa dan merupakan salah satu kelompok rentan yang haknya masih terabaikan, oleh karena itu hak-hak anak menjadi penting diprioritaskan.⁴⁹ Mengenai definisi anak, ada banyak pengertian dan definisi secara awam, anak dapat

⁴⁵Al-qur'an Tajwid Dan Terjemahan, Maghfiroh Pustaka.

⁴⁶QS. Al-Furqan (25): 74

⁴⁷Al-qur'an Tajwid Dan Terjemahan, Maghfiroh Pustaka.

⁴⁸Paulus Hadisuprpto, *Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya*, (Malang: Selaras, 010), 11.

⁴⁹PERMEN Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 15 Tahun 2010, Pedoman Umum Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI

diartikan sebagai seseorang yang dilahirkan akibat hubungan antara pria dan wanita ini jika terikat dalam suatu ikatan perkawinan.

Dalam konsideran UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Untuk itu, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan definisi anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁵⁰

7. Hak Anak

1) Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Islam

Seorang anak memiliki hak yang banyak dan beragam, ada yang bersifat dzhohir adan ada pula yang bersifat bathin. Semua hak itu termasuk

⁵⁰M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013), 10.

dalam lima hal pokok “*Kulliyat Khams*”, yang di dalamnya ajaran Islam banyak berkaitan. Kelimanya mencakup menjaga jiwa, akal, kehormatan, agama dan harta. Secara global hak-hak ini bisa disebut sebagai ”pemeliharaan umum” yang dibawahnya terdapat cabang-cabang seperti pemeliharaan kesehatan, akhlak, dan agama. Masing-masing aspek ini mempunyai kontribusi dalam pembentukan individu dalam kadar tertentu hingga ia dewasa dan mandiri.⁵¹

Dalam Islam terdapat beberapa petunjuk tentang perlindungan terhadap hak-hak anak. Sejumlah ayat al Qur'an dan Hadits Nabi SAW secara garis besar mengemukakan hak-hak anak sebagai berikut:

1. Hak Anak untuk Hidup

Islam menghapus tradisi Arab Jahiliyah dalam hal pembunuhan terhadap anak karena kekhawatiran tidak mampu menanggung biaya hidup sebagaimana QS.Al Isra' Ayat 31.⁵²

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةً إِمْلَاقٍ
 وَنَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

*Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rizki kepada mereka, dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar.”*⁵³

Dan khusus kasus-kasus pembunuhan dan penguburan bayi perempuan dalam tradisi Arab Jahiliyah karena merasa malu mempunyai anak

⁵¹M. Fauzi Rachman, *Islamic Parenting*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011), vi-vii.

⁵²QS. Al-Isra (17): 31

⁵³Al-qur'an Tajwid Dan Terjemahan, Maghfiroh Pustaka.

perempuan, beresiko tinggi, membebani hidup keluarga karena anak perempuan tidak dapat ikut perang, dan menjadi sumber petaka. Biasanya anak perempuan menjadi tawanan perang jika kalah perang, yang dapat menjatuhkan martabat kabilahnya. Firman Allah SWT Q8. Al An'am Ayat 140.⁵⁴ Menggambarkan sikap Islam terhadap bangsa Arab Jahiliyah dengan tradisinya membunuh anak perempuan.

قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ
افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ ۖ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ

*Artinya: "Sesungguhnya rugilah orang-orang yang membunuh anak-anak mereka karena kebodohan dan tidak mengetahui dan mereka mengharamkan apa-apa yang telah Allah rizkikan kepada mereka dengan semata-mata mengada-adakan terhadap Allah. Sesungguhnya mereka telah sesat dan tidaklah mereka mendapat petunjuk."*⁵⁵

Kedua landasan teologis di atas menunjukkan bahwa Islam memberikan penghargaan dan perlindungan yang sangat tinggi kepada hak hidup anak baik ketika dia masih dalam kandungan maupun ketika telah dilahirkan.⁵⁶

2. Hak Anak dalam Kejelasan Nasabnya

Salah satu hak dasar diberikan oleh Allah sejak anak dilahirkan adalah hak untuk mengetahui asal usul yang menyangkut keturunannya. Kejelasan nasab sangat urgen dalam menentukan statusnya untuk mendapatkan hak-hak dari orang tuanya, dan secara psikologis anak juga mendapatkan ketenangan dan kedamaian sebagaimana layaknya manusia. Kejelasan nasab berfungsi sebagai dasar bagaimana orang lain memperlakukan terhadap anak dan

⁵⁴QS. Al-An'am (6): 140

⁵⁵Al-qur'an Tajwid Dan Terjemahan, Maghfiroh Pustaka.

⁵⁶Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam*, (Malang:UIN-MALIKI PRESS), 273-275

bagaimana anak seharusnya mendapatkan hak-hak dari lingkungan keluarganya. Namun demikian jika terdapat anak-anak yang tidak diketahui nasabnya bukan berarti dia kehilangan hak-haknya dalam hal pengasuhan, perawatan, pendidikan dan pendampingan hingga dia menjadi dewasa, karena setiap anak harus mendapatkan hak-haknya tanpa melihat apakah jelas nasabnya atau tidak ada kejelasan nasabnya. QS. Al-Ahzab Ayat 5.⁵⁷

ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ
 ۚ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاْتُواكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ
 ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

*Artinya: "Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu[1199]. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."*⁵⁸

Kata "bapak" dalam hal ini merupakan kebiasaan masyarakat penganut budaya patriarkhi, di mana anak selalu dinasabkan dengan bapaknya, sedangkan anak-anak di luar nikah dinasabkan kepada ibunya. Kata "bapak" dimaksud untuk memberikan penghargaan atas eksistensi anak pada lingkungannya, agar dia mendapatkan perlakuan sosial yang sama sekalipun status dia sebagai anak angkat.⁵⁹

3. Hak Anak dalam Mendapatkan Asuhan, Perawatan dan Pemeliharaan

⁵⁷QS. Al-Ahzab (33): 5

⁵⁸Al-qur'an Tajwid Dan Terjemahan, Maghfiroh Pustaka.

⁵⁹Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam*, (Malang:UIN-MALIKI PRESS), 275-276

Setiap anak dilahirkan memerlukan perawatan, pemeliharaan, dan pengasuhan untuk mengantarkannya menuju kedewasaan. Pembentukan jiwa anak sangat dipengaruhi oleh cara perawatan dan pengasuhan anak sejak dia dilahirkan. Tumbuh kembang anak diperlukan perhatian yang serius, terutama masa-masa sensitif anak, misalnya balita (bayi di bawah lima tahun). Pertumbuhan kesehatan mengalami masa-masa rawan penyakit karena ketahanan fisiknya masih lemah. Demikian pula perkembangan psikologis anak juga mengalami fase-fase yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat perkembangan jiwanya. Lingkungan terutama orang tua memiliki andil yang cukup besar dalam menentukan tumbuh kembang anak. Keteladanan langsung dari orang tua baik ayah maupun ibu dalam membentuk kepribadian anak menjadi kata kunci yang harus ditekankan. Oleh karena itu hak pengasuhan anak secara ideal adalah orang tua sendiri, kecuali ada halangan syara' yang mengharuskan pindahnya hak asuh dari orang tua kepada orang lain yang lebih menjamin tumbuh kembang anak dengan baik.⁶⁰

4. Hak Anak dalam Kepemilikan Harta Benda

Hukum Islam menepatkan anak yang baru dilahirkan telah menerima hak waris. Hak waris maupun harta benda lainnya, tentu belum dapat dikelola oleh anak karena keterbatasan kemampuan untuk melakukannya. Karena itu orang tua atau orang yang dapat dipercaya terhadap amanat ini dapat mengelola hak atas harta benda anak untuk sementara waktu sampai ia

⁶⁰Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam*, 277-278.

mampu untuk mengelola sendiri. Untuk menjaga kemaslahatan dan melindungi hak properti anak ini, Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah Ayat 220.⁶¹

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
 وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ ۖ قُلْ صَلَاحٌ لَّهُمْ مَخِيرٌ ۖ وَإِنْ شَخَطُوا هُمْ قِيَامُكُمْ
 ۖ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

*Artinya: “Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, maka katakanlah: Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu, dan Allah mengetahui siapa yang berbuat kerusakan dari yang berbuat kebaikan.”*⁶²

Siapa saja orang dewasa terutama yang terdekat dari kehidupan anak, diwajibkan untuk melindungi harta anak yatim dan menjaga amanah dengan baik hingga mereka dewasa. QS. Al Isra’ Ayat 34.⁶³

وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ
 ۚ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۚ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

*Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang baik sampai ia dewasa dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu diminta pertanggung jawabannya.”*⁶⁴

Allah juga mengancam bagi orang-orang yang melakukan perbuatan aniaya terhadap hak anak yatim sebagaimana dalam Q5. Al Nisa’ Ayat 10.⁶⁵

⁶¹QS. Al-Baqarah (2): 220

⁶²Al-qur’an Tajwid Dan Terjemahan, Maghfiroh Pustaka.

⁶³QS. Al-Isra’ (17): 34

⁶⁴Al-qur’an Tajwid Dan Terjemahan, Maghfiroh Pustaka.

⁶⁵QS. An-Nisa’ (4): 10

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا
 ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta benda anak yatim, sebenarnya mereka menelan api sepenuh perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api (neraka) yang menyala-nyala.”⁶⁶

Anak yatim berulang-ulang disebut dalam al Qur'an tidak lain karena mereka termasuk kelompok marjinal yang sering mendapatkan perlakuan tidak adil, sementara tidak ada Orang yang memberikan perlindungan. Kelompok lemah dan tertindas sebagaimana mayoritas anak yatim dan juga perempuan di masa jahiliyah menjadi perhatian Islam bahkan menjadi salah satu misi risalah Islam itu sendiri.⁶⁷

5. Hak Anak dalam Memperoleh Pendidikan dan Pengajaran

Semua anak yang terlahir di dunia mendapatkan hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran. Hak pendidikan ini bagi anak bersifat komprehensif, baik dalam mengembangkan nalar berfikirnya (pengembangan intelektual), menanamkan sikap dan perilaku yang mulia, memiliki keterampilan untuk kehidupannya, dan menjadikan sebagai manusia yang memiliki kepribadian yang baik.

Pendidikan bagi anak merupakan kebutuhan vital yang harus diberikan dengan cara-cara yang bijak untuk menghantarkannya menuju kedewasaan dengan baik. Kesalahan dalam mendidik anak di masa kecil akan

⁶⁶Al-qur'an Tajwid Dan Terjemahan, Maghfiroh Pustaka.

⁶⁷Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam*, 278-279.

mengakibatkan rusaknya generasi yang akan datang. Ayah, ibu atau orang dewasa lainnya yang turut mempengaruhi pembentukan kepribadian anak yang paling besar pengaruhnya terhadap anak.

Segala sesuatu yang terjadi dalam hubungan antara orang tua-anak (termasuk emosi, reaksi dan sikap orang tua) akan membekas dan tertanam secara tidak sadar dalam diri seseorang. Selanjutnya, apa yang sudah tertanam akan termanifestasi kelak dalam hubungan dengan keluarganya sendiri. Jika hubungan dengan orang tuanya dulu memuaskan dan membahagiakan, maka kesan emosi yang positif akan tertanam dalam memori dan terbawa pada kehidupan perkawinannya sendiri. Orang demikian, biasanya tidak mengalami masalah yang berarti dalam kehidupan perkawinannya sendiri. Sebaliknya, dari pengalaman emosional yang kurang menyenangkan bersama orang tua, akan terekam dalam memori dan menimbulkan stress (yang berkepanjangan, baik ringan maupun berat). Berarti, ada *the unfinished business* dari masa lalu yang terbawa hingga kehidupan berikutnya, termasuk kehidupan perkawinan. Segala emosi negatif dari masa lalu, terbawa dan mempengaruhi emosi, persepsi/pola pikir dan sikap orang tersebut di masa kini, baik terhadap diri sendiri, terhadap pasangan dan terhadap makna perkawinan itu sendiri.⁶⁸

Dengan demikian, belajar dan memperoleh pendidikan merupakan hak dasar anak tanpa ada perlakuan diskriminatif ras, suku, agama, maupun laki-laki dan perempuan.

⁶⁸Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam*, 280-281.

2) Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014

Anak tetaplah anak, dengan segala ketidakmandirian yang ada mereka sangatlah membutuhkan perlindungan dan kasih sayang dari orang dewasa di sekitarnya. Anak mempunyai berbagai hak yang harus diimplementasikan dalam kehidupan dan penghidupan mereka.⁶⁹

Keberadaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mempertegas perlunya legitimasi terhadap hak anak yang selama ini masih bias. Berikut isi pasal-pasal terkait pemenuhan hak anak dalam Undang-Undang tersebut;

1. Pasal 4 mengatur tentang hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2. Pasal 5 mengatur tentang hak memperoleh nama sebagai suatu identitas diri. Dalam pasal ini menyatakan: setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. Dalam pasal ini sudah cukup jelas bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan nama yang baik sebagai identitas diri.
3. Pasal 6 hak untuk beribadah. Dalam pasal ini menyatakan : *“Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir, dan berekspresi sesuai*

⁶⁹Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2012), 13.

dengan tingkat kecerdaan dan usianya, dalam bimbingan orang tua".⁷⁰

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada anak dalam rangka mengembangkan kreativitas dan intelektualitasnya (daya nalarnya) sesuai dengan tingkat usia anak. Ketentuan pasal ini juga menegaskan bahwa pengembangan tersebut masih tetap harus berada dalam bimbingan orang tua atau walinya.⁷¹

4. Pasal 7 ayat (1) dan pasal 14 mengatur tentang hak memperoleh asuhan.

Dalam pasal 7 ayat (1) menyatakan: *"setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri"*.⁷²

Sedangkan dalam pasal 14 dikatakan bahwa: *"setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir"*.⁷³ Ketentuan dalam pasal ini yang dimaksudkan dengan "Pemisahan" antara lain pemisahan akibat perceraian dan situasi lainnya dengan tidak menghilangkan hubungan Anak dengan kedua Orang Tuanya, seperti Anak yang ditinggal Orang Tuanya ke luar negeri untuk bekerja, Anak yang Orang Tuanya ditahan atau dipenjara.⁷⁴

5. Pasal 8 mengatur pelayanan kesehatan dan jaminan sosial. Dalam pasal ini menyatakan bahwa: *"Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan*

⁷⁰ Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Jakarta:Sinar Grafika, 2015), 6.

⁷¹Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, 45-46.

⁷² Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, 66.

⁷³ Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, 7.

⁷⁴ Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, 46.

dan jaminan social sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan social".⁷⁵ Ketentuan dalam pasal ini sudah sangat jelas bahwa anak berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan jaminan social sesuai dengan kebutuhan fisiknya.

6. Pasal 9 ayat (1) mengatur tentang hak memperoleh pendidikan. Dalam pasal ini menyatakan bahwa: *"Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasan sesuai dengan minat dan bakat"*.⁷⁶ Pasal ini cukup jelas mengatur tentang hak seorang anak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran dengan tujuan mengembangkan pribadi dan kecerdasannya.
7. Pasal 10 tentang hak untuk berpendapat. Dalam pasal ini menyatakan bahwa: *"Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan"*. Pasal ini cukup jelas mengatur hak anak untuk dapat didengar pendapat menerima mencari informasi sesuai dengan kecerdasannya serta usianya.
8. Pasal 11 mengatur tentang hak untuk berekreasi dan berkreasi. Dalam pasal ini menyatakan bahwa: *"Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain,*

⁷⁵ Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, 66.

⁷⁶ Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, 6.

*berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.*⁷⁷

9. Pasal 12 menyatakan bahwa “*Setiap Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.*”

10. Pasal 14 menyatakan bahwa:

- 1) Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- 2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak: a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya; b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan d. memperoleh Hak Anak lainnya

11. Pasal 15 menyatakan bahwa “Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata;

⁷⁷ Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, 67.

- c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan;
- e. pelibatan dalam peperangan; dan
- f. kejahatan seksual

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.⁷⁸ Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian meliputi: jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data.

A. Jenis Penelitian

Dari latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum empiris. Dalam penelitian ini, penulis mendeskripsikan secara detail dan mendalam tentang suatu keadaan atau fenomena sosial dari objek penelitian yang diteliti dengan cara mengembangkan konsep yang ada serta menghimpun kenyataan yang terjadi.⁷⁹

Penelitian hukum sosiologis adalah penelitian yang berupa studi empiris untuk menemukan teori-teori tentang proses terjadinya dan

⁷⁸Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), 1.

⁷⁹Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 133

bekerjanya hukum dalam masyarakat.⁸⁰ Dalam konteks ini, studi empiris yang dimaksud berkenaan dengan Peranan Orang Tua Tunggal (Janda cerai mati) Terhadap Pemenuhan Hak Anak di Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar.

B. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan pemaparan diatas, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *case study*. Yang diolah secara kualitatif, pendekatan adalah rumpun ilmu yang berupaya untuk memahami perilaku manusia dari segi kerangka berfikir maupun bertindak orang-orang itu sendiri yang difokuskan pada informasi dari data-data deskriptif (kata-kata tertulis atau lisan dari informan), bukan data numerik yang membutuhkan analisis statistik.

Dengan kata lain pendekatan kualitatif ini bersifat atau memiliki karakteristik bahwa datanya dinyatakan dalam keadaan kewajaran atau sebagaimana adanya (natural setting) dengan tidak merubah dalam bentuk simbol ataupun bilangan mempergunakan cara kerja yang sistematis, terarah dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga pada penelitian ini tidak kehilangan sifat ilmiyahnya (serangkaian proses penjaringan data lapangan).

Sementara itu, berdasarkan sifat penelitian dan metode pemaparan data, penelitian ini terkategori sebagai penelitian deskriptif. Artinya, informasi berupa kata-kata (jawaban) informan menjadi data utama dalam penelitian

⁸⁰BambangSunggono, *MetodePenelitianHukum*(Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2003), 42.

ini.⁸¹ Data tersebut kemudian digambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat, sehingga diperoleh interpretasi yang dapat menjawab tujuan penelitian dengan tepat.⁸²

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar. Dimana disana terdapat sebuah lingkungan yang padat penduduk seperti halnya kehidupan metropolitan. Area yang biasa disebut “Kampung Seng” tersebut merupakan salah satu permukiman padat penduduk di Kota Blitar. Bagi warga Kota Blitar Kampung Seng cukup dikenal sebagai kampung preman dengan segala cerita kriminal dan amoralnya.

Daerah dengan angka kriminalitas yang tinggi dan kehidupan pinggiran kota. Mulai dari golongan muda hingga golongan tua kehidupan mabuk-mabukan, judi, sabung ayam, parkir liar sudah membudaya. Dan seorang ibu dibenturkan dengan keadaan lingkungan yang seperti itu dengan status janda atau orang tua tunggal yang harus tetap maksimal memberikan nafkah dan nilai-nilai pendidikan ditengah lingkungannya itu. Untuk itu lokasi ini dipilih berdasarkan pertimbangan tersebut, serta untuk memudahkan peneliti dalam penelitian.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data merupakan salah satu yang paling vital dalam penelitian. Karena, sumber data dalam suatu penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Kesalahan-kesalahan dalam menggunakan atau memahami

⁸¹ Robert C. Bogdan & Sari Knopp Bikken, *Qualitative Research for Education; an Introduction to Theory and Method* (USA: Allyn and Bacon, 1992), 5.

⁸² F.L. Whitney, *The element of Research* (New York: Prentice Hall Inc, 1960), 160.

sumber data, maka data yang diperoleh juga akan meleset dari yang diharapkan.⁸³ Maka sumber data diklasifikasikan menjadi:

a) Data Primer

Sumber Data Primer (*primary data*), yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama yakni para pihak yang menjadi obyek penelitian ini⁸⁴. Data primer ini diperoleh dari wawancara dengan keluarga yang terdiri dari orang tua tunggal dan anak-anaknya yang berada di lingkungan Kelurahan Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kota Blitar.

Tabel 1.2: Informan

No	Nama	Usia	Janda Dari Tahun	Jumlah Anak
1.	Siti Nasfiyah	41	2014	4
2.	Syamsiyah	53	2004	2
3.	Siti Maswiyah	48	2009	2
4.	Istiar	41	2010	2
5.	Siti Rohana	41	2018	3

b) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diambil sebagai penunjang tanpa harus terjun ke lapangan, antara lain mencakup dokumen-dokumen

⁸³Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial* (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 32.

⁸⁴Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), 12.

resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.⁸⁵

Sumber data ini merupakan sumber data yang membantu memberikan keterangan atau sebagai data pelengkap yang nantinya secara tegas dikorelasikan dengan data primer. Adapun dokumen yang terkait yaitu berupa dokumen yang mendukung adanya pembahasan mengenai peranan orang tua tunggal (janda cerai mati) dalam penentuan hak anak yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kota Blitar. Sebagai data penunjang lain yaitu dengan adanya buku-buku, serta dokumen-dokumen tertulis seperti skripsi, jurnal, artikel, dan data-data dari para informan.

Peneliti menggunakan data sekunder ini untuk memperkuat penemuan dan melengkapi informasi yang telah dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan masyarakat Kelurahan Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kota Blitar.

c) Data Tersier

Data-data penunjang, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap sumber data primer dan sumber data sekunder, diantaranya Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah :

⁸⁵Amiruddin dan Zainal asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 31.

1. Wawancara

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) sebagai pengaju/pemberi pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu.⁸⁶ Dalam pengertian lain wawancara merupakan cara untuk mengumpulkan data dengan mengadakan tatap muka secara langsung antara orang yang bertugas mengumpulkan data dengan orang yang menjadi sumber data atau objek penelitian.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara terstruktur. Yaitu wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan yang akan diajukan.⁸⁷ Untuk mendapatkan data-data yang jelas dan rinci dari fokus masalah yang ada dalam penelitian, peneliti terlebih dahulu mempersiapkan secara garis besar pertanyaan-pertanyaan yang memuat hal-hal pokok sebagai pedoman. Dan dari yang seluruh rangkaian kegiatan wawancara ini selalu digunakan catatan-catatan.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu pencarian data berdasarkan sumber tertulis, arsip, catatan, dokumen resmi, dan sebagainya.⁸⁸ Salah satu teknik pengumpulan data yang ditujukan kepada subjek penelitian. Sedangkan

⁸⁶Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), 127.

⁸⁷Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian*, h. 130.

⁸⁸Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 206.

dokumentasi menurut Suharsimi Arikunto adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti dan sebagainya.⁸⁹ Metode pengumpulan data dalam studi kepustakaan atau dokumentasi dilakukan dengan pencatatan berkas-berkas atau dokumen yang memiliki hubungan dengan objek penelitian sedang dibahas.⁹⁰ Di dalam dokumentasi, peneliti mengambil dari penelitian ini yaitu foto yang peneliti ambil pada saat wawancara dengan para informan.

F. Metode Pengolahan Data

Setelah data diproses dengan proses diatas, maka tahap selanjutnya adalah pengolahan data. Dan agar menghindari banyak kesalahan dan mempermudah pemahaman maka peneliti dalam menyusun penelitian ini akan melakukan beberapa upaya diantaranya sebagai berikut:

1. Pemeriksaan data (*Editing*)

Editing yaitu meneliti kembali catatan para pencari data untuk mengetahui apakah catatan tersebut sudah cukup baik dan dapat segera dipersiapkan untuk keperluan proses berikutnya.⁹¹ Proses *editing* yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara memeriksa kembali catatan, berkas, informasi, dari hasil wawancara dengan pihak informan yang berada di Kelurahan Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kota Blitar maupun dokumentasi terutama dalam hal kelengkapan, kesesuaian, kejelasan makna, serta relevansinya dengan penelitian yang akan dilakukan.

⁸⁹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, 231.

⁹⁰Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 6.

⁹¹Kontjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997), 270.

2. Klasifikasi (*Classifying*)

Classifying yaitu mengklarifikasi data-data yang telah diperoleh agar lebih mudah dalam melakukan pembacaan data sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Tahap ini bertujuan untuk memilih data yang diperoleh dengan permasalahan yang dipecahkan dan membatasi beberapa data yang seharusnya tidak dicantumkan dan tidak dipakai dalam penelitian ini. Atau menyusun data-data yang diperoleh dari para informan kedalam pola tertentu guna mempermudah pembahasan.

3. Verifikasi (*Verifying*)

Setelah data yang diperoleh dari lapangan diklasifikasikan, langkah berikutnya yang dilakukan adalah verifikasi (pemeriksaan) data yaitu mengecek kembali dari data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya apakah benar-benar sudah valid dan sesuai dengan yang diharapkan peneliti.⁹²

Dalam hal ini peneliti memeriksa kembali seluruh data yang diperoleh dari lapangan seperti hasil wawancara dengan beberapa Janda (cerai mati) di Kelurahan Sukorejo. Peneliti akan meneliti kembali keabsahan datanya dengan cara mendengarkan kembali hasil wawancara peneliti dengan para informan dan mencocokkannya dengan hasil wawancara yang sudah ditulis oleh peneliti.

⁹²J Moleong, *Metodologi Penelitian*, 104.

4. Analisis data (*Analysing*)

Proses selanjutnya yakni menganalisis data-data yang sudah terkumpul dari proses pengumpulan data yaitu melalui wawancara dan dengan sumber datanya seperti buku-buku, kitab-lkitanb, jurnal dan lain sebagainya untuk memperoleh hasil yang lebih efisien dan sempurna sesuai dengan yang peneliti harapkan.

Metode analisis yang digunakan peneliti adalah deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.⁹³

5. Kesimpulan (*Concluding*)

Concluding, pada tahap yang kelima ini peneliti menarik beberapa poin untuk menarik jawaban atas pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah berupa kesimpulan-kesimpulan tentang penelitian peranan orang tua tunggal (janda cerai mati) dalam memenuhi hak anak di Kelurahan Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kota Blitar dan pemenuhan hak anak dalam perspektif UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

⁹³LKP2M, *Research Book For LKP2M*, (Malang: Universitas Islam Negeri Malang, 2005), 60.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Profil Daerah

Dulu sebelum tahun 1965 Pasar Legi (pasar di dekat Kampung Seng) merupakan pasar hewan atau yang biasa disebut dengan pasar sapi. Selain digunakan untuk berdagang kampung ini merupakan tanah pemerintah yang digunakan oleh pria pekerja kasar, pada malam hari pasar ini digunakan untuk bermalam para gelandangan atau pekerja yang tidak memiliki tempat tinggal, atau dalam istilah jawa disebut *bambung*.

Pasca peristiwa 1965, Blitar menjadi sebuah kota yang menakutkan dan mencoloknya represi militer dengan mengatasnamakan stabilitas politik. Bahkan oleh wartawan Kompas yang menulis pada tahun 1970an disebut sebagai Kota Karantina Politik. Berbagai usaha dilakukan untuk membersihkan kota dari *anasir-anasir kiri*, salah satunya dengan membina mereka yang potensial membuat keonaran, entah atas nama ideologi maupun desakan ekonomi. Pemerintah kota saat itu menginstruksikan mereka untuk menempati rumah tembok besar yang beratapkan seng. Sejak saat itulah kampung ini dijuluki Kampung Seng.⁹⁴

2. Penduduk

Mayoritas penduduk kampung seng bekerja sebagai pemulung, tukang parkir dan buruh kasar di Pasar Legi. Mereka yang tidak termasuk dalam

⁹⁴Jito Baskoro, Wawancara, (Blitar 25 Maret 2018), 10:00 WIB.

salah satu jenis pekerjaan ini memilih menjadi tenaga keamanan swasta, *debt collector* atau melakukan pekerjaan lainnya. Tak jarang mereka menjadi tenaga bayaran untuk mengamankan agenda partai politik maupun konglomerat lokal. Sektor informal seperti pemulung dan kuli pasar menjadi tulang punggung mereka. Tak jarang mereka juga terlibat kasus-kasus kriminal seperti pencurian dan perampokan.

Pasar yang merupakan pusat kegiatan ekonomi menjadi area nyaman bagi banyak preman. Bisnis keamanan dan perniagaan kelas pinggiran mereka kuasai dengan memanfaatkan jaringan preman yang mengandalkan kekuatan fisik dan intimidasi. Mereka hidup membaur dengan warga yang menjadi pekerja di sektor informal pinggiran.⁹⁵

B. Paparan Data

1. Peranan Orang Tua Tunggal (Janda Cerai Mati) dalam Memenuhi Hak Anak di Kelurahan Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kota Blitar

Peranan orang tua tunggal terlebih bagi seorang istri yang ditinggal oleh suaminya karena meninggal duniatentu saja tidak mudah. Ibu yang berstatus orang tua tunggal harus mampu mengatur secara optimal peranannya sebagai seorang ibu maupun ayah bagi anak-anaknya. Ibu harus berjuang mencari nafkah untuk kelangsungan hidupnya serta anak-anaknya, memberi perhatian dalam pendidikan anak, yang merupakan tugas suami karena mengalami pergeseran semua menjadi alih fungsi.

⁹⁵Jito Baskoro, Wawancara, (Blitar 25 Maret 2018), 10:00 WIB.

Pemenuhan hak anak adalah kegiatan untuk menjamin kebutuhan, melindungi dan memberikan apa yang seharusnya anak dapatkan yakni hak dalam mendapatkan asuhan, perawatan, dan pemeliharaan, serta hak dalam memperoleh pendidikan dan pengajaran.

Ada beberapa faktor yang melatar belakangi tidak terpenuhinya hak anak tersebut yang berujung pada penelantaran anak salah satunya adalah faktor ekonomi, serta anak kerap melakukan tindak kekerasan akibat kurangnya kasih sayang dari orang tuanya.

Berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan terhadap informan yakni terhadap *parasingle parent* (janda cerai mati) selaku informan dalam penelitian ini, paparan data mengenaip peranan orang tua tunggal (janda cerai mati) dalam memenuhi hak anak dapat di jabarkan sebagai berikut:

a. Ibu Maswiyah

Beberapa peranan yang dilakukan oleh orang tua tunggal (janda cerai mati) dalam memenuhi hak anak yang seharusnya anak dapatkan agar seorang anak dapat melakukan hak dan kewajibannya. Menurut ibu Maswiyah, pemenuhan hak anak dengan cara memenuhi kebutuhannya sehari-hari, biaya pendidikan dan kebutuhan-kebutuhan yang lain.

“Bagi saya ya seperti itu mas untuk memenuhi hak yang harus didapatkan anak saya dengan cara memberikan mereka apa yang menjadi kebutuhan sehari-harinya dengan hasil saya kerja.”⁹⁶

⁹⁶Maswiyah, Wawancara, (Blitar 26 Maret 2018), 10:00 WIB.

Pemahaman tentang hak anak menurut ibu Maswiyah hanya berujung pada materi saja, dengan materi anak bisa terpenuhi segala kebutuhan yang dia inginkan.

Terlalaikannya hak anak yang lain oleh orang tua sangat memungkinkan apalagi jika orang tua *single parent*. Mereka memposisikan diri mereka sebagai ayah untuk mencari nafkah dan akhirnya lupa akan kewajibannya sebagai ibu untuk memberikan kasih sayang terhadap anaknya, lagi-lagi anak menjadi kurang kasih sayang dan menjadi salah asuhan.

Dalam pemenuhan hak anak mendapatkan pengasuhan hal yang menjadi pendukung adalah orang tua. Orang tua bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak-hak anak sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Sebagai orang tua harus bisa menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal dan terarah. Dalam hal ini orang tua menjadi faktor pendukung dalam pemenuhan hak anak dalam pengasuhan.

Seharusnya sebagai orang tua Ibu Maswiyah tidak mengesampingkan peran yang seharusnya dilakukan sebagai ibu secara utuh, memberikan kasih sayang. Materi sebanyak apapun tidak akan pernah mampu menggantikan peran ibu yang seharusnya memberikan kasih sayang kepada anaknya.

b. Ibu Istiar

Menurut ibu Istiar yang telah menjanda 7 tahun silam, semenjak itulah kebutuhan keluarga ibu Istiar tersebut banyak yang tidak terpenuhi karena

terhimpit faktor ekonomi. Ibu Istiar yang dulunya bergantung pada penghasilan suami, akhirnya setelah ditinggal mati suaminya ia harus membanting tulang sendiri demi memenuhi nafkah anak-anaknya. Ibu Istiar menyadari bahwa semua yang menyangkut kebutuhan anak-anaknya merupakan kewajibannya sebagai orang tua. Hanya saja menurut ibu Istiar, semua kebutuhan anak akan dipenuhi apabila memiliki kemampuan yang cukup. Jika tidak cukup akan diberikan apa adanya sesuai dengan penghasilannya. Berikut penturannya,

*“Sepengetahuan saya masalah pemenuhan hak-hak anak adalah apa yang anak-anak saya butuhkan itulah yang akan saya berikan. Akan tetapi sesuai dengan kemampuan saya sebagai orang tua. Kalau pas lagi punya ya saya berikan langsung, kalau tidak ya saya tunda dulu sampai saya punya uang. Selama ini hak yang biasa saya berikan kepada anak-anak saya yaitu hak belanjanya sehari-hari. Sementara untuk sekolahnya saya tidak mampu lagi untuk membiayai anak saya. Ya, semenjak empatbulan sejak ayahnya meninggal anak saya lebih memilih berhenti dari sekolahnya. Karena dia merasa kasian kepada saya mas. Dia tau uang untuk makan kita saja kadang kekurangan, untuk belanjanya dia sehari-hari juga begitu. Dia berhenti sekolah pas itu kelas 6 SD sampai sekarang. Masalahnya ya itu tadi saya hanya mengandalkan pekerjaan hasil buruh saja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Intinya apa yang menjadi kebutuhan anak saya akan saya penuhi selama saya mampu memenuhinya”.*⁹⁷

Ibu Istiar juga menuturkan bahwa selama ini merasa tidak bisa memenuhi hak-hak anaknya. Karena faktor ekonominya yang sangat minim, anak ibu Istiar rela putus sekolah demi membantu ibunya mencari nafkah untuk biaya makan keluarga mereka sehari-hari.

Pada dasarnya semua anak yang terlahir di dunia mendapatkan hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran. Hak pendidikan ini bagi

⁹⁷Istiar, Wawancara, (Blitar 26 Maret 2018), 15:30 WIB.

anak bersifat komprehensif, baik dalam mengembangkan nalar berfikirnya (pengembangan intelektual), menanamkan sikap dan perilaku yang mulia, memiliki keterampilan untuk kehidupannya, dan menjadikan sebagai manusia yang memiliki kepribadian yang baik.⁹⁸

Faktanya, hal yang terjadi pada anak-anak Ibu Istiar tidak memperoleh hak pendidikan disebabkan karena terhimpitnya faktor ekonomi keluarga. Hal tersebut disebabkan karena pengetahuan tentang hak pendidikan anak yang kurang di pahami oleh Ibu Istiar. Kalaupun Ibu Istiar sadartentang program pemerintah yang mencanangkan program wajib belajar 9 tahun sehingga bisa saja anak memperoleh bantuan terkait biaya pendidikan ataupun proses belajarnya yang lain. Kejadian macam ini tidak akan terjadi. Disamping itu memang peran aktif warga sekitar maupun pemerintah sangat dibutuhkan dalam kemajuan pendidikan.

c. Ibu Syamsiyah

Ibu Syamsiyah menjalani hidup sebagai *single parent* selama 13 tahun. Pada usia 46 tahun suaminya meninggal dunia. Sejak saat itu dia sendiri yang membiayai anak-anaknya dalam menempuh setiap jenjang pendidikan. Tidak jauh beda dengan apa yang dipaparkan oleh informan sebelumnya, dimana materi adalah alat untuk memenuhi kebutuhan seorang anak. Ibu Syamsiyah juga memaparkan hal yang sama bahwa upaya pemenuhan hak anak dapat dilakukan secara maksimal dengan cara memehuni kebutuhan sandang, pangan dan biaya pendidikan.

⁹⁸Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam*, 280.

Seperti yang ibu tuturkan, yaitu:

*“Semenjak suami saya meninggal, saya sendiri yang harus bekerja keras untuk membiayai kebutuhan anak-anak saya. Untuk masalah finansial hanya mengandalkan upah saya sebagai penjahit, sehingga saya harus mencari sampingan sebagai penjual kain kiloan untuk membiayai kedua anak saya”.*⁹⁹

Kepuasan setiap orang berbeda-beda dalam hal terpenuhinya sebuah keutuhan, seperti yang informan diatas kemukakan bahwa terpenuhinya sebuah hak anak yakni jika kebutuhan sehari-hari tercukupi dan biaya sekolah juga tercukupi.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang tercantum dalam bab IV pada Pasal 26 yang Ayat 1 yang berbunyi: “Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.”¹⁰⁰ Isi muatan pasal di atas menegaskan orang tua berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya.

Untuk memelihara dan merawat anak diperlukan kesabaran, pengertian dan kasih sayang, sehingga tidak dibolehkan mengeluh dalam menghadapi berbagai persoalan mereka.¹⁰¹

d. Ibu Siti Naswiyah

Tidak jauh beda dengan keluarga yang lain, dalam hal ini upaya pemenuhan hak anak dilakukan ibuNaswiyah dengan cara memenuhi kebutuhan sehari-hari anak, dan tugas ibu sebagai ibu dari anak-anaknya,

⁹⁹Syamsiyah, Wawancara, (Blitar 26 Maret 2018), 19:00 WIB.

¹⁰⁰Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, 8.

¹⁰¹Andi Syamsu dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), 115-116.

dia juga harus menggantikan peran ayah terhadap anak, mulai dari mencari nafkah, membiayai pendidikan dan lain-lain.

*“Selama saya ditinggal mati suami, cara saya memenuhi kebutuhan anak dengan bekerja sebagai penjual kue-kue dan jajanan pasar ke kantin-kantin dan menerima pesanan hajatan juga. Semisal ada yang butuh tenaga masak juga saya yang datang kerumahnya. Ya dengan itu saya memenuhi keuangan untuk sekolah anak-anak dan untuk makan sehari-hari”.*¹⁰²

Selain itu ibu Naswiyah juga menuturkan,

*“Setiap anak saya pulang sekolah mereka juga membantu saya dirumah untuk menyelesaikan pesanan. Biasanya selesai tergantung jumlah yang dimasak mas. setelah itu mereka belajar dan kemudian langsung tidur, ya seperti itu kesehariannya. Terkadang saya juga kasian melihat mereka bekerja keras membantu saya. Tapi mau bagaimana lagi ya begini keadaannya.”*¹⁰³

Keterbatasan masalah finansial bukanlah suatu hal yang menghalangi pemenuhan hak-hak terhadap anak. Berbagai rasa suka dan duka serta memahami peran, fungsi dan kedudukan ibu maupun anak dalam kehidupan sosial dan profesinya, saling memberikan dukungan, akses, berbagi peran pada konteks tertentu dan memerankan peran bersama-sama dalam konteks tertentu pula. Seperti halnya yang terjadi pada keluarga ibu Naswiyah yang memungkinkan untuk berbagi peran tradisional domestik secara fleksibel sehingga dapat dikerjakan siapa saja yang memiliki kesempatan dan kemampuan diantara anggota keluarga tanpa memunculkan diskriminasi, maka berbagi peran ini sangat baik untuk menghindari beban ganda bagi salah satu antara ibu (orang tua tunggal/janda cerai mati), maupun anak. Pengaturan peran atas dasar kekeluargaan ini dilakukan berlandaskan pada

¹⁰²Naswiyah, Wawancara, (Blitar 27 Maret 2018), 10:00 WIB.

¹⁰³Naswiyah, Wawancara, (Blitar 27 Maret 2018), 10:00 WIB.

kesamaan visi, adanya komitmen, saling mengikhlaskan dan fleksibel sehingga dapat beradaptasi dengan perubahan. Seringkali dalam kehidupan keluarga yang bias toleransi memberikan beban yang tidak seimbang pada anggota keluarga yang dapat memicu munculnya konflik dalam keluarga.

e. Ibu Siti Rohana

Pendapat yang lainnya adalah ibu Siti Rohana, janda yang baru ditinggal suaminya per-Januari 2018 ini mengenai pemenuhan hak-hak anak beliau menuturkan bahwa hak-hak anak yang telah diberikan selama ini adalah hak anak untuk sekolah, biaya hidup, dan tempat tinggal. Selama ini ibu Rohana tetap berusaha untuk memenuhi hak-hak anaknya meskipun pekerjaannya hanyalah sebagai ibu rumah tangga biasa, namun beliau menuturkan masih mempunyai sawah untuk dipekerjakan ke orang lain. Hasil jualan untuk kebutuhan anak-anak dan menyambung hidup.

Namun disini yang menjadi kendala adalah mengurus anak. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Rohana:

*“kendala saya menjadi janda itu masalah mengasuh anak mas. Karena menjadi janda itu tantangannya adalah anak. Gimana caranya anak sukses dunia akhirat. Perangainya baik. Soalnya akan tetap menjadi tanggung jawab orang tua di akhirat. Masalah ekonomi sama juga menjadi kendala. Akan tetapi tetap saya usahakan sedikit-sedikit dari hasil sawah dan mungkin dari hasil yang lain. Pernah mas saya tidak punya uang sama sekali, sampai tidak kuat memberi uang saku anak-anak. Rasanya pengen nangis sendiri.”*¹⁰⁴

¹⁰⁴Rohana, Wawancara, (Blitar 27 Maret 2018), 20:00 WIB.

Selain itu ibu juga menuturkan,

*“Kalau anak saya sakit biasanya saya cuman bisa membelikan dia obat di warung. Untuk bawa ke dokter saya tidak mampu mas. Buat makan sehari-hari saja kadang masih kekurangan.”*¹⁰⁵

Meski dalam keadaan bagaimanapun orang tua tetap harus memenuhi kewajibannya terhadap anak. Keterbatasan masalah ekonomi bukan suatu hal yang menghalangi pemenuhan kewajiban orang tua terhadap hak anak-anaknya. Kurangnya perhatian orang tua yang konsisten, stabil dan tulus, seringkali menjadi penyebab kurang terpenuhinya kebutuhan anak akan kasih sayang, rasa aman, dan perhatian. Anak harus bersusah payah dan berusaha mendapatkan perhatian dan penerimaan orang tua, namun seringkali orang tua tetap tidak memberikan respon seperti yang diharapkan.¹⁰⁶

Tabel 1.3

Aspek Pemenuhan Hak Anak oleh Orang Tua Tunggal

(Janda Cerai Mati)

No.	Nama	Pendidikan Anak	Hak Mendapatkan Kasih Sayang	Diasuh dan dipelihara orang tua sendiri
1.	Ibu Maswiyah	Terpenuhi	Tidak Terpenuhi	Terpenuhi
2	Ibu Istiar	Tidak Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi
3.	Ibu Syamsiyah	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi

¹⁰⁵Rohana, Wawancara, (Blitar 27 Maret 2018), 20:00 WIB.

¹⁰⁶Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam*, 289.

4.	Ibu Siti Naswiyah	Terpenuhi	Tidak Terpenuhi	Terpenuhi
5.	Ibu Siti Rohana	Terpenuhi	Tidak Terpenuhi	Terpenuhi

2. Pemenuhan Hak Anak dalam Perspektif UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Dari observasi secara langsung yang dilakukan oleh peneliti yang sudah dipaparkan dalam beberapa deskripsi diatas, sudah jelas bahwa persoalan pemenuhan hak anak merupakan masalah klasik yang kerap kali terjadi akibat perceraian orang tua, yaitu perceraian akibat ditinggal mati suaminya, dan akibat masalah ini tidak sedikit anak yang menjadi korban, seperti anak menjadi depresi dikarenakan tidak terpenuhinya hak anak dan ketidak utuhan orang tua dalam mendidik dan memelihara anak, padahal sudah jelas diatur dalam Undang-Undang Hak Anak Pada Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, serta Pasal 14. Isi dari Undang-Undang tersebut yaitu:

Pasal 8

“Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan social sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan social”.

Pasal 9 Ayat (1)

“Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasan sesuai dengan minat dan bakat”.

Pasal 11

“Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi

sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri”.

Pasal 14

- 1) *Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.*
- 2) *Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:*
 - a) *Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;*
 - b) *Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;*
 - c) *Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan Memperoleh Hak Anak Lainnya.*

Dari pemaparan Undang-Undang diatas dapat peneliti simpulkan bahwa sudah sangat jelas sekali yang dipaparkan Undang-Undang tersebut berbanding terbalik dengan fakta yang ada dimasyarakat.

Dari observasi yang dilakukan peneliti, beberapa keluarga pasca perceraian tidak menjalankan amanat yang diberikan oleh Undang-Undang. Dalam realitanya pasca perceraian dikatakan melalaikan tanggung jawab dalam hal mendidik dan memelihara anak. Pasalnya anak yang seharusnya mendapatkan hak mereka untuk tetap memperoleh pendidikan harus berhenti karena faktor ekonomi yang sangat minim. Selain itu anak yang seharusnya berhak untuk bermain, bergaul dengan teman sebaya, beristirahat justru mereka tidak memperoleh haknya tersebut. Lagi lagi karena faktor ekonomi inilah hak anak menjadi terlalaikan.

Dalam hal ini seharusnya orang tua bisa lebih bijaksana jika itu menyangkut masalah anak. Dilihat dari data-data yang penulis paparkan diatas dapat disimpulkan setiap orang tua tunggal (janda cerai mati khususnya) mayoritas melalaikan hak-hak anaknya yang seharusnya anak dapatkan. Dengan begitu anak disini menjadi korban kelalaiannya.

Padahal sudah jelas diatur dalam Undang Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak dalam pasal 9 Ayat (1), Pasal 11 serta Pasal 14 yang mengatur tentang hak anak memperoleh pendidikan, serta memperoleh waktu luang. Dalam pasal 9 ayat (1) menyatakan :*“Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasan sesuai dengan minat dan bakat”*.¹⁰⁷ Pasal 11 dikatakan bahwa :*“Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri*.¹⁰⁸ Dan dalam Pasal 14 dikatakan pula bahwa : *“Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya”*.

Dalam pasal 9 dan 11 sudah sangat jelas bahwa memperoleh pendidikan serta beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bermain adalah hak anak. Bukan hanya terbatas pada membesarkan dan mengasuh

¹⁰⁷ Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, (Jakarta:Sinar Grafika, 2015), 6.

¹⁰⁸ Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, 67.

saja hak yang didapatkan oleh anak masih banyak hak-hak yang seharusnya anak dapat tetapi dikesampingkan oleh orangtuanya.

C. Analisis Data

Berbicara tentang anak tentu saja tidak akan lepas dari batas usia untuk di sebut seorang anak, dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, anak adalah mereka yang berumur dibawah 18 tahun, sedangkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, anak adalah mereka yang belum berumur 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan.

Anak merupakan amanah dari Allah SWT yang diberikan kepada setiap orangtua, anak juga buah hati, anak juga cahaya mata,tumpuan harapan serta kebanggaan keluarga.Anak adalah generasi mendatang yang mewarnai masa kini dan diharapkan dapat membawa kemajuan dimasa mendatang. Agar anak kelak mampu memikul tanggung jawab maka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun social dan berakhlak mulia. Untuk itu perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya guna mendapatkan hak yang seharusnya anak dapatkan.

Keluarga merupakan kelembagaan (institusi) primer yang sangat penting dalam kehidupan manusia, baik sebagai individu maupun masyarakat. Setiap individu berangkat dari sistem sosial keluarga, sebelum ia memasuki sistem sosial yang lebih besar yaitu masyarakat. Keluarga merupakan subsistem (unit) kelembagaan terkecil dalam sistem sosial yang lebih besar,

seperti masyarakat, bangsa, negara. Keluarga merupakan basis awal kehidupan bagi bagi setiap insan dan menjadi tempat pertama dan utama bagi anak untuk memperoleh hak-hak anak. Perlindungan hak-hak anak dalam keluarga di Indonesia seharusnya diaplikasikan sesuai dengan prinsip-prinsip, asas-asas, dan tujuan hukum syara’.

Hak anak dapat terpenuhi jika, terpenuhinya hak hidup setiap orang pasti sudah menikmati hak hidup kecuali mereka yang sudah meninggal dunia, yaitu meliputi hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan sebaik-baiknya , hak mendapat kasih sayang, hak mendapat pendidikan dalam keluarga yakni dalam pasal 14 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 bahwa setiap orang tua wajib bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anaknya.¹⁰⁹

Yang dimaksud dengan pendidikan adalah kewajiban orang tua untuk memberikan pendidikan dan pengajaran yang memungkinkan anak tersebut menjadi manusia yang mempunyai kemampuan dan dedikasi hidup yang dibekali dengan kemampuan dan kecakapan dengan pembawaan bakat anak tersebut yang akan dikembangkannya ditengan-tengah masyarakat Indonesia sebagai landasan hidup dan penghidupannya setelah lepas dari tanggung jawab orang tua.¹¹⁰

¹⁰⁹Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Jakarta:Sinar Grafika, 2015), 7.

¹¹⁰ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2004), 294.

Pada saat orang tua bekerja anak juga sering menjadi terlantar, bahkan anak tidak mendapatkan pengasuhan, dan kasih sayang. Jadi prinsip utama dalam mengasuh anak adalah anak berada dalam lingkungan keluarga. Oleh karena itu prioritas layanan adalah untuk memperkuat peran keluarga dalam mengasuh dan melindungi anak.

Sesuai dengan data yang penulis dapatkan dari lapangan bahwa pemenuhan hak anak berbeda-beda yaitu dengan cara memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan mengesampingkan hak yang lainnya dan tidak memberikan hak yang seharusnya anak dapat. Pemenuhan hak anak tidak saja dilihat sebatas materi belaka, akan tetapi masih banyak hak-hak anak yang terabaikan seperti hak untuk mendapatkan kasih sayang, dari lima informan yang penulis wawancarai hanya beberapa saja yang faham terhadap makna pemenuhan hak terhadap anak, faktanya tidak semua orang yang mengungkapkan pemenuhan hak anak bukan saja dilihat sebatas materi akan tetapi kasih sayang terhadap anak juga sebagai hak yang seharusnya anak dapatkan.

Jika pemenuhan hak anak hanya dilihat dari materi saja, bukan hanya orang tua yang bisa memenuhi kebutuhan anak, orang lainpun bisa memenuhi kebutuhan anak. Undang-Undang No. 35 tahun 2014 menyebutkan bahwa *“setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai kebutuhan fisik, mental spriritual, dan sosial”*.¹¹¹ Dari sini dapat

¹¹¹Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 7.

diketahui bahwa, hak anak bukan hanya sebatas materi saja, akan tetapi pemenuhan dari segi psikis juga di butuhkan.

Terlalaikannya hak anak dari segi psikis sangat memungkinkan apalagi jika yang mengasuh anak hanya satu orang saja, seperti istri yang ditinggal mati suaminya. Mereka sibuk mengurus mencari nafkah demi menghidupi kehidupan anak-anaknya dan lupa akan kewajiban lain terhadap anaknya, sehingga anak menjadi korban kelalaiannya. Dalam Islam juga disebutkan bahwa anak berhak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya, mengungkapkan kasih sayang tidak hanya secara verbal, tetapi juga dengan perbuatan. Akan tetapi kenyataan dimasyarakat berbanding terbalik dengan apa yang dicita-citakan dalam Islam, seharusnya seorang ibu memberikan kasih sayang yang di tunjukkan dengan perbuatan berbanding terbalik dengan realita. Dari sini dapat kita ketahui bahwa implementasi hak anak mendapatkan kasih sayang menurut hak anak dalam islam masih dikatakan jauh dari yang diharapkan.

Ada beberapa faktor yang melatar belakangi tidak terpenuhinya hak anak dalam Pasal 14 Undang-Undang no. 35 Tahun 2014 Tentang Hak Anak pasca perceraian khususnya cerai mati salah satunya adalah himpitan ekonomi. Sehingga dukungan dari pihak lain dan juga orang tua (ibu) dalam mengasuh anaknya sangatlah diperlukan.

Selain itu dalam penelitian ini, peneliti juga menganalisa kasus yang berdampak pada penjaminan hak anak yang telah diatur oleh Undang-Undang hak anak pada Pasal 9 Ayat (1) dan Pasal 11, yang isinya sebagai berikut:

Pasal 9 Ayat (1)

“Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasan sesuai dengan minat dan bakat”.

Pasal 11

“Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri”.

Dalam kutipan Undang-Undang diatas diterangkan pada Pasal 9 Ayat

(1) bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dan Ayat 11 menerangkan bahwa etiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain. Dari hasil pengamatan, setiap wawancara yang peneliti lakukan keseluruhan tidak semuanya berdampak buruk bagi terpenuhinya hak anak. Di sini peneliti menemukan suatu kasus dimana anak yang masih sekolah dasar harus membantu ibunya bekerja mencari nafkah, padahal anak yang sebaya dengannya sepulang sekolah harusnya beristirahat atau juga bermain. Selain itu ada juga yang rela harus berhenti sekolah karena terhimpit faktor ekonomi keluarganya.

Pemenuhan hak anak tidak saja berhenti sampai pada bagaimana orang tua bisa memberi makan anak tersebut, masih banyak lagi hak-hak anak yang belum masyarakat fahami mengenai hak untuk memperoleh pendidikan (baik formal maupun non formal) yang tercantum pada Konveksi Hak Anak, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak bahwasanya anak berhak untuk beristirahat, bermain.

Konvensi Hak Anak

- 1) *Hak terhadap Kelangsungan Hidup*
Yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (*the rights of life*) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya (*the rights to the highest standard of health and medical care attainable*).
- 2) *Hak terhadap Perlindungan*
Yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan ketelantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi.
- 3) *Hak untuk Tumbuh Kembang*
Yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (*formal maupun non formal*) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan social anak.
- 4) *Hak untuk Berpartisipasi*
Yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi hak anak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak (*the rights of a child to express her/his views in all matters affecting that child*).¹¹²

Sudah sangat jelas dipaparkan oleh Undang-undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Konvensi Hak Anak bahwa anak mempunyai hak-hak yang sama dalam suatu Negara. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.

Sesuai dengan apa yang penulis dapatkan dilapangan setiap orang tua yang bercerai khususnya cerai matidalam hal ini seharusnya orang tua bisa lebih bijaksana jika itu menyangkut masalah anak.

Dilihat dari data-data yang penulis paparkan diatas dapat disimpulkan setiap orang tua yang bercerai selalu saja melalaikan hak anak dan menyepelekan anak. Terkadang untuk memenuhi hak-hak anak yang satu, mereka melalaikan hak-hak anak yang lainnya dengan begitu untuk

¹¹² Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak*, 34.

memenuhi hak-hak yang seharusnya dia dapatkan secara utuh dan sempurna, justru anak tidak mendapatkan hak tersebut secara tidak sempurna. Untuk itu perlu rasanya para orang tua mengetahui tentang aturan-aturan yang berlaku sebagai hak dan kewajiban masing-masing anggota keluarga agar tidak lagi menyepelekan anak dan menjadikan hak-haknya sebagai korban.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melalui beberapa tahap pengolahan serta analisis data penelitian, maka dalam langkah terakhir ini peneliti menarik kesimpulan dari kumpulan data yang sudah melalui tahapan-tahapan sebelumnya dengan cermat, terutama dalam menjawab pertanyaan yang tertuang dalam rumusan masalah. Maka peneliti dapat menyimpulkan penelitian pada kasus ini sesuai dengan apa yang menjadi rumusan dan tujuan masalah yang telah dimunculkan. Kesimpulan tersebut diantaranya:

1. Peranan orang tua *single* (janda cerai mati) dalam pemenuhan hak anak pasca perceraian selama ini belum mampu untuk melaksanakan ketentuan perlindungan hak-hak anak, disebabkan beberapa faktor yang menjadi kendala, antara lain keterbatasan ekonomi, kelalaian orang tua. Pemahaman masyarakat dalam melaksanakan kewajiban sebagai orang tua terutama pelaku perceraian sangat minim terbukti dengan pengetahuan hak anak yang hanya sebatas tentang biaya hidup saja. Sehingga hak-hak anak yang lain tidak terpenuhi.
2. Pemenuhan hak anak perspektif Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan dalam tataran implementasinya belum sepenuhnya terpenuhi, sehingga dapat dikatakan hak-hak anak belum sepenuhnya dapat terlindungi. Karena kurang mengertinya masyarakat awam tentang

bagaimana aturan hukum itu benar-benar berlaku dan faktor ekonomi khususnya yang menjadikan salah satu alasan tidak terpenuhinya hak-hak anak tersebut.

B. Saran

1. Untuk memperkuat kualitas dan kapasitas serta keutuhan keluarga dengan anak, pemerintah dan pemerintah Daerah wajib/bertanggung jawab mewujudkan pelayanan diantaranya pelatihan bagi orang tua dan anak, kesempatan kerja dan peningkatan penghasilan serta bantuan sosial.
2. Bagi pemerintah untuk memberikan sosialisasi yang nyata dengan tujuan agar setiap orang yang sedang ataupun akan membina rumah tangga mengetahui bagaimana dampak terlantarnya anak. Setidaknya mengetahui apa saja hak dan kewajiban jika menjadi orang tua, dan apa saja hak-hak anak tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemahan, Maghfiroh Pustaka

Al-Jauhari Mahmud Muhammad dan Muhammad Abdul Hakim
Khayyal.*Membangun Keluarga Qur'ani Panduan Untuk Wanita Muslimah.*
Jakarta: Amzah. 2005.

Al-Nahlawi,Abdurrahman.*Prinsip-Prinsip dan Metode Pendidikan Islam.*
Bandung: Diponegoro. 1984.

Amiruddin dan Zainal Asikin.*Pengantar Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: PT.
Raja Grafindo Persada. 2004.

Arikunto,Suharsimi.*Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek.* Jakarta:
Rineka Cipta. 2002.

Bogdan, Robert C. & Sari Knopp Bikken.*Qualitative Research for Education; an
Introduction to Theory and Method.* USA: Allyn and Bacon. 1992.

Bungin,Burhan.*Metodologi Penelitian Sosial.* Surabaya: Airlangga University
Press. 2001.

Djamil,M. Nasir.*Anak Bukan Untuk Dihukum.* Jakarta Timur: Sinar Grafika.
2013.

Fakih,Mansour.*Analisis Gender dan Transfirmasi Sosial.* Yogyakarta: Pustaka
Pelajar. 2008.

Hadikesuma,Hilman.*Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju. 2007.

Hafifuddin, Di Dun.*Dakwah Aktual*. Jakarta: Gema Insani Pers. 1998.

Hanifah, Muhammad Nur Abdul.*Mendidik Anak Bersama Rasulullah*. Bandung: al-Bayan. 1997.

Kontjaraningrat.*Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 1997.

Langgulang,Hasan.*Manusia dan Pendidikan*, Cet. I. Jakarta: al-Husna. 1956.

LKP2M.*Research Book For LKP2M*. Malang: Universitas Islam Negeri Malang. 2005.

Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam*. Malang:UIN-MALIKI PRESS.

Muslim,Imam.*Shahih Muslim*, Juz 1V. Singapura, Sulaiman Mara'i.

Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi.*Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2003.

Nashriana.*Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.2012.

Nazir,Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalla Indonesia. 1988.

Nuruddin, Amir dan Azhari Akmal.*Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group. 2004.

Qaimi,Ali.*Masa Depan Anak*. Bogor: Penerbit Cahaya. 2002.

- Rachman,M. Fauzi.*Islamic Parenting*. Jakarta: Penerbit Erlangga. 2011.
- Soekanto,Soerjono.*Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press. 1986.
- Soekanto,Soerjono.*Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2005.
- Sudarsono.*Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta. 2005.
- Suhandi, Hendi.*Penngantar Studi Sosiologi Keluarga*. Bandung: Pustaka Setia. 2010.
- Sunggono,Bambang.*Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2003.
- Suprpto,HadiPaulus.*Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya*. Malang: Selaras. 2010.
- Syamsu, Andi dan M. Fauzan.*Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. Jakarta: Prenada Media Group. 2008.
- Whitney,F.L. *The element of Research*. New York: Prentice Hall Inc. 1960.

WEB

- <http://artikata.com/arti-373678-peranan.html>, diakses tanggal 05 Maret 2018, 13:12 WIB.
- <https://yandiyulio.wordpress.com/2012/01/20/makalah-single-parent/>, diakses tanggal 05 Maret 2018, 12:40 WIB

www.bimarasolusindo.co.id/kewajiban-orangtua-kepada-anak-anaknya/, diakses

pada tanggal 07 Maret 2018, 11:29 WIB

http://repository.radenintan.ac.id/1360/5/BAB_IV.pdf

SKRIPSI

Taufik. *Dampak Pola Asuh Single Parent Terhadap Tingkah Laku Beragam Remaja (Studi Kasus Dua Remaja Pada Dua Keluarga Single Parent di Dusun Kuden, Siti Mulyo, Piyungan, Bantul*. Yogyakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2014.

Sirajudin. *Pemenuhan Hak-Hak anak pasca perceraian Orang Tua Di Desa Bonder Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah NTB*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 2011.

Dewi Fitriyani. *Pemenuhan Hak-Hak Hadhanah Anak Pasca Perceraian ditinjau dari UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Dusun Banjarwaru Desa Kelir Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi)*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 2016.

Undang-Undang

Kompilasi Hukum Islam Pasal 77

PERMEN Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 15 Tahun 2010, Pedoman Umum Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI

Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Jakarta:

Sinar Grafika. 2015.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Wawancara dengan Ibu Maswiyah



Wawancara dengan Ibu Naswiyah



Wawancara dengan Ibu Syamsiyah



Wawancara dengan Ibu Istiar

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



INFORMASI PRIBADI

Nama : Muhammad TsabutSu'aifin
Tempat, Tanggalahir : Blitar, 25 Desember 1994
Alamat : Jl.Manggar No.25 Kota Blitar
Pekerjaan : Mahasiswa
Jurusan : Al-Akhwat Al-Syakhsiyyah
No. HP : 085854791672
Email : tsabut19@gmail.com

PENDIDIKAN

- TK Al-Hidayah Sukorejo Kota Blitar, (Tahun1999-2001).
- SDI Sukorejo Kota Blitar, (Tahun 2001-2007)
- MTsN 1 Kota Blitar, (Tahun 2007-2010).
- SMAN 1 Kota Blitar, (Tahun 2010-2013).
- Ma'had Sunan Ampel Al-Aly UIN Maliki Malang, (Tahun 2013-2014).
- Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, (Tahun 2013-2018)